



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 38.B/LHP/XIX.MKS/05/2022
Tanggal : 16 Mei 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv
GLOSARIUM.....	vi
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	viii
BAB I.....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
A. Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp31.281.335.648,86.....	1
2. Kebijakan Akuntansi Investasi, Aset Tidak Berwujud, Kewajiban, Belanja, dan Koreksi Kesalahan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Dimutakhirkan	5
B. Pendapatan.....	10
Penaan NJOPTKP atas Perhitungan PBB-P2 Tidak Dapat Ditelusuri per Wajib Pajak	10
C. Belanja.....	13
1. Realisasi Belanja BOS Reguler untuk Pembayaran Honorarium ASN Tidak Sesuai Peruntukan.....	13
2. Pembayaran Premi Asuransi Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan.....	14
3. Pemberian Beasiswa Daerah Tidak Tepat Sasaran.....	18
D. Aset.....	21
Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib	21
BAB II.....	31
IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Rincian Belanja Modal Yang Salah Pembebanan	2
Tabel 1. 2	Rincian Belanja Barang dan Jasa Yang Menghasilkan Aset Tetap	3
Tabel 1. 3	Ketidakkonsistenan Pengenaan NJOPTKP	10
Tabel 1. 4	Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan BP Berstatus Pindah	15
Tabel 1. 5	Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan BP Berstatus Meninggal	15
Tabel 1. 6	Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan BP Berstatus Tidak Ditemukan di SIAK	16
Tabel 1. 7	Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan BP Lebih dari Satu Kali	16
Tabel 1. 8	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020	21
Tabel 1. 9	Daftar OPD dengan Aset Tetap KIB A yang Tidak Memiliki Sertifikat.....	23
Tabel 1. 10	Daftar Sekolah yang Tidak Memiliki Pencatatan Aset Tetap.....	24
Tabel 1. 11	Daftar sekolah SMA yang masih tercatat di KIB B	25
Tabel 1. 12	Daftar bidang tanah yang dipergunakan tanpa surat pinjam pakai	25
Tabel 1. 13	Daftar OPD dengan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya.....	25
Tabel 1. 14	Daftar OPD dengan Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat	26
Tabel 2. 1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II 2021	31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja
- Lampiran 2 Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap
- Lampiran 3 Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap
- Lampiran 4 Penerima Beasiswa Daerah Yang Tidak Sesuai Kriteria Peraturan Bupati
- Lampiran 5 Daftar Aset Tetap dengan Keberadaan Tidak Diketahui
- Lampiran 6 Daftar Aset Tetap dengan Status Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
- Lampiran 7 Rekapitulasi Jumlah Ruas Jalan pada KIB D Masing-Masing OPD
- Lampiran 8 Rekapitulasi Jumlah Ruas Jalan Pada KIB D Per Klasifikasi Per Masing-Masing OPD
- Lampiran 9 Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
A	
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
ASN	Aparatur Sipil Negara
B	
BAST	Berita Acara Serah Terima
BA PAHP	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pekerjaan
BA STHP	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Bapemperda	Badan Pembentukan Peraturan Daerah
BMD	Barang Milik Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BP	Bukan Pekerja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPKD	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKB	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CCO	<i>Contract Change Order</i>
D	
DED	<i>Detail Engineering Design</i>
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
F	
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
J	
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
K	
KDH/WKDH	Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	Kartu Inventaris Barang
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
L	
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
P	
PAD	Pendapatan Asli Daerah

PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Perbup	Peraturan Bupati
Permen PU	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendikbud	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPK-BLUD	Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah
PPKÚ	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pustu	Puskesmas Pembantu
R	
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
S	
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	Sekolah Dasar
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPI	Sistem Pengendalian Intern
T	
TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
U	
UU	Undang-Undang

GLOSARIUM

A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah
B Barang Milik Daerah	Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
Bantuan Operasional Sekolah	Program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar
D Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
I Inventarisasi	Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah
J Jaminan Kesehatan Nasional	Merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah
L Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

O	
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
S	
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
T	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 38.A/LHP/XIX.MKS/05/2022 tanggal 16 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Investasi, Aset Tidak Berwujud, Kewajiban, Belanja, dan Koreksi Kesalahan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Dimutakhirkan;
2. Realisasi Belanja BOS Reguler untuk Pembayaran Honorarium ASN Tidak Sesuai Peruntukan; dan
3. Pembayaran Premi Asuransi Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPKD untuk segera melakukan inventarisasi permasalahan Kebijakan Akuntansi secara menyeluruh dan mengajukan revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan BOS kepada setiap sekolah; dan

3. Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan agar memvalidasi secara berkala, daftar usulan peserta PBP dan BP yang akan diusulkan setiap bulan kepada Kantor BPJS Kabupaten Luwu Timur.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 16 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Paula Henry S. S. S., M.Si., Ak.,
CA, CFA, CSEA, CPA (Aust), ACPA
Register Negara Akuntan, No. RNA-13085

BAB I

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp31.281.335.648,86

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan anggaran dan realisasi Belanja TA 2021 (*Audited*) sebesar Rp1.366.652.780.892,00 dan Rp1.304.324.041.910,40 (95,44%). Berdasarkan pemeriksaan terhadap anggaran dan realisasi Belanja TA 2021 diketahui bahwa dalam penyusunan anggaran terdapat ketidaksesuaian pembebanan belanja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan uraian sebagai berikut:

a. Kesalahan penganggaran pada empat OPD

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat kesalahan penganggaran pada empat OPD sebagai berikut.

1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menganggarkan dan merealisasikan:

- a) Belanja Subsidi Kepada BUMN masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 dan Rp199.095.000,00 (99,55%), yang penggunaannya untuk pemasangan akses listrik yang ditujukan kepada warga kurang mampu. Pembebanan anggaran tersebut seharusnya disajikan pada Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu;
- b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai, serta Penanggulangan Bencana Alam masing-masing sebesar Rp1.656.000.000,00 dan Rp1.358.839.678,00 (82,06%), yang penggunaannya untuk pekerjaan rehabilitasi tanggul Jl. M. Natsir di Lingkungan Batu Merah pada Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota. Pembebanan anggaran tersebut seharusnya disajikan pada Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.

2) Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menganggarkan dan merealisasikan Belanja Jasa Tenaga Pendidikan masing-masing sebesar Rp18.458.000.000,00 dan Rp18.423.250.000,00 (97,80%), yang penggunaannya antara lain untuk

membayar jasa tenaga pendidikan pada PAUD, SD dan SMP Swasta sebesar Rp4.311.750.000,00. Pembebanan anggaran tersebut seharusnya disajikan pada Belanja Hibah-Belanja Hibah Masyarakat/Swasta-Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta.

- 3) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor masing-masing sebesar Rp231.000.000,00 dan Rp230.457.874,37 (99,77%), yang penggunaannya antara lain untuk Pembangunan Gudang Kantor sebesar Rp183.492.874,37 dan Rak Penyimpanan Barang sebesar Rp30.000.000,00. Pembebanan anggaran tersebut seharusnya disajikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor masing-masing sebesar Rp185.850.000,00 dan Rp183.842.000,00 (98,92%), yang penggunaannya antara lain untuk Rehabilitasi Bangunan Kantor sebesar Rp106.019.000,00. Pembebanan anggaran tersebut seharusnya disajikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Rincian seluruh kondisi salah pembebanan anggaran tersebut diatas dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

b. Penganggaran antar pos Belanja Modal yang kurang tepat

Dari hasil penelusuran terhadap rincian realisasi Belanja Modal TA 2021, diketahui terdapat reklasifikasi Aset Tetap senilai total Rp15.998.081.024,91 pada 17 OPD, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Rincian Belanja Modal Yang Salah Pembebanan

	Belanja Modal (Rp)				Jumlah OPD Terkait	
	BM Peralatan dan Mesin	BM Gedung dan Bangunan	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	Total		
KIB	KIB A		1.579.379.227,27	183.819.300,00	1.763.198.527,27	3
	KIB B		5.155.075.039,40	3.105.654.909,50	8.260.729.948,90	3
	KIB C			182.213.046,82	182.213.046,82	1
	KIB D	358.335.139,00	5.096.149.362,92		5.454.484.501,92	8
	KIB E	11.425.000,00			11.425.000,00	1
	ATB	326.030.000,00			326.030.000,00	1
	Total	695.790.139,00	11.830.603.629,59	3.471.687.256,32	15.998.081.024,91	17

Dari hasil konfirmasi kepada Pengurus Barang masing-masing OPD, diperoleh penjelasan bahwa seluruh Aset Tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penyesuaian akun Aset Tetap di Neraca. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

c. Perolehan Aset Tetap dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa

Dari hasil penelusuran terhadap rincian realisasi Belanja TA 2021, diketahui terdapat Aset Tetap senilai total Rp9.094.058.071,58 pada tiga OPD, yang diperoleh dari Belanja Barang dan Jasa sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Rincian Belanja Barang dan Jasa Yang Menghasilkan Aset Tetap

OPD	Rek. Belanja/Awal	Rek. Belanja Sebenarnya	Nilai Total (Rp)
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.641.226.454,00
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.877.815.599,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Belanja Gedung dan Bangunan	198.925.600,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.984.988,65
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.127.413.429,93
		Belanja Modal Tanah	44.462.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.731.000,00
		Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	42.499.000,00
Total			9.094.058.071,58

Dari hasil konfirmasi kepada Pengurus Barang masing-masing OPD, diperoleh penjelasan bahwa seluruh Aset Tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan penyesuaian akun Aset Tetap di Neraca dan akun Beban di Laporan Operasional Tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada Lampiran I.03 Pernyataan SAP Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 02 tentang LRA Berbasis Kas pada paragraf 37 yang menyatakan bahwa "Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi";
- b. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada bagian C Kebijakan Penyusunan APBD poin 2. a.
 - 1) angka 2, Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek;
 - 2) angka 4, Belanja Subsidi ditujukan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Lampiran II Akuntansi Aset Tetap pada Klasifikasi Aset Tetap angka 2 s.d. angka 6 yang menyebutkan:

- 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 3) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Lebih saji pada akun:
 - 1) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp4.382.786.018,58,
 - 2) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.389.623.605,37,
 - 3) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp4.311.750.000,00,
 - 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp695.790.139,00,
 - 5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.830.603.629,59,
 - 6) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.471.687.256,32,
 - 7) Belanja Subsidi kepada BUMN sebesar Rp199.095.000,00;
- b. Kurang saji pada akun:
 - 1) Belanja Modal Tanah sebesar 1.807.660.527,27,
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.931.956.402,90,
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp832.366.509,84,
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.861.052.208,85,
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.425.000,00,
 - 6) Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp326.030.000,00,
 - 7) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp199.095.000,00,
 - 8) Belanja Hibah sebesar Rp4.311.750.000,00; dan
- c. Menimbulkan risiko salah persepsi pada pemangku kepentingan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Luwu Timur tidak cermat memverifikasi ketepatan anggaran yang diajukan oleh masing-masing OPD terkait (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Perhubungan, Kecamatan Angkona, dan RSUD I La Galigo); dan
- b. Kepala OPD terkait (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Perhubungan, Kecamatan Angkona, dan RSUD I La Galigo) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat dalam mengusulkan RKA-OPD.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menerima temuan BPK. Ketidaksihinggaan penganggaran dan pembebanan belanja, akan ditindaklanjuti oleh Bidang Aset untuk melakukan reklasifikasi sesuai ketentuan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan:

- a. TAPD agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran;
- b. Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran (PA)/KPA agar mengusulkan penganggaran dan melaksanakan realisasi belanja daerah sesuai substansinya; dan -
- c. Para Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan Kepala Subbagian Program masing-masing OPD agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun RKA.

2. Kebijakan Akuntansi Investasi, Aset Tidak Berwujud, Kewajiban, Belanja, dan Koreksi Kesalahan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Dimutakhirkan

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 22 Lampiran yang meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi akun mengatur definisi,

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa atas metode akuntansi yang dipilih dan pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Berdasarkan hasil telaah, praktik Akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah sesuai dengan SAP. Namun demikian kebijakan tertulis terkait dengan Akuntansi Investasi, Aset Tidak Berwujud, Kewajiban, Belanja, dan Koreksi Kesalahan, belum sepenuhnya dimutakhirkan, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum mengatur kebijakan akuntansi sesuai PSAP Nomor 15 mengenai Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
- b. Pada Lampiran 10 tentang Kebijakan Akuntansi Investasi belum mengatur Pengungkapan sesuai PSAP Nomor 6;
- c. Pada Lampiran 14 tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud belum direvisi sesuai dengan PSAP Nomor 14;
- d. Pada Lampiran 15 tentang Kebijakan Akuntansi Kewajiban belum memuat penjelasan Utang Transfer dan Utang PFK sesuai PSAP Nomor 9;
- e. Pada Lampiran 17 tentang Kebijakan Akuntansi Belanja, diketahui bahwa rincian klasifikasi Belanja sudah tidak sesuai lagi dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Selain itu dari telaah Lampiran Kebijakan Akuntansi, ditemukan perbedaan nilai batas kapitalisasi pada Kebijakan Akuntansi Belanja dengan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yaitu pada Aset Tetap jenis Tanah, Peralatan dan Mesin (Alat Besar, Alat Studio, Alat Persenjataan), Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya (Hewan/Tanaman); dan
- f. Pada Lampiran 21 tentang Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, belum mengatur Pengungkapan sesuai PSAP Nomor 10.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PSAP Nomor 15 mengenai Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan yang menyatakan bahwa PSAP berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021;
- b. PSAP Nomor 6 menyatakan bahwa hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
 - 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
 - 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - 6) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
 - 7) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
 - 8) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
 - 9) Perubahan klasifikasi pos investasi;

- 10) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi;
- c. PSAP Nomor 14 menyatakan:
- 1) pada uraian Keteridentifikasi bahwa aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila: (a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau (b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya;
 - 2) pada uraian Pengendalian bahwa tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut;
 - 3) pada uraian Manfaat Ekonomi dan Sosial Masa Depan bahwa karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah;
 - 4) pada uraian Pengakuan Aset Tak Berwujud (ATB) yang Diperoleh Secara Internal bahwa untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu: (a) tahap penelitian/riset; dan (b) tahap pengembangan;
 - 5) pada uraian Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal bahwa pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini: (a) menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau (b) meningkatkan nilai guna, dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi;
 - 6) pada uraian Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud (*Retirement and Disposal*) bahwa ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 7) pada uraian Penyajian dan Pengungkapan bahwa Laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan ATB, antara lain:
 - a) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

- d) Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
 - i) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - j) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- d. PSAP Nomor 9 menyajikan pengertian utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk utang PFK, PSAP menyatakan bahwa pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e. PSAP Nomor 10 menyatakan:
- 1) pada uraian Kebijakan Akuntansi bahwa ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud;
 - 2) pada uraian Konsistensi Kebijakan Akuntansi bahwa entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut;
 - 3) pada uraian Perubahan Kebijakan Akuntansi bahwa suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila: (a) Disyaratkan oleh suatu PSAP, atau (b) Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas;
 - 4) pada uraian Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi bahwa ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf (16), maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya;
 - 5) pada uraian Pengungkapan bahwa bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:
 - a) sifat perubahan kebijakan akuntansi;
 - b) alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
 - c) nilai penyesuaian untuk setiap *item* laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;

- d) laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- e) dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut;
- 6) pada uraian Kesalahan bahwa kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena: (a) keterlambatan bukti transaksi; (b) kesalahan perhitungan matematis; (c) kesalahan penerapan kebijakan akuntansi; (d) kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta (e) kecurangan;
- 7) pada uraian Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan bahwa pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan;
- 8) pada uraian Perubahan Estimasi Akuntansi bahwa tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain.

Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan.

Hal tersebut disebabkan Kepala BPKD Kab. Luwu Timur tidak menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menerima temuan BPK dan akan menindaklanjuti temuan dengan perubahan Kebijakan Akuntansi yang mengakomodir perubahan Kebijakan Akuntansi Investasi, Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Kebijakan Akuntansi Kewajiban, Kebijakan Akuntansi Belanja, dan Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala BPKD untuk segera melakukan inventarisasi permasalahan Kebijakan Akuntansi secara menyeluruh dan mengajukan revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Pendapatan

Pengenaan NJOPTKP atas Perhitungan PBB-P2 Tidak Dapat Ditelusuri per Wajib Pajak

Pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2021, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp178.777.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp183.113.097.975,64 (*Audited*) atau 102,43%. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp4.512.686.071,64 merupakan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan tersebut dikelola oleh Subbidang Penagihan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 Tahun Pajak 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diketahui bahwa masih terdapat pengenaan NJOPTKP yang tidak dapat ditelusuri per Wajib Pajak yaitu:

- terdapat objek pajak hanya berupa bumi (tanah) yang tidak dikenakan NJOPTKP,
- terdapat objek pajak berupa bumi dan bangunan yang tidak dikenakan NJOPTKP; dan
- terdapat subjek pajak yang memiliki beberapa objek pajak bumi dan bangunan dikenakan NJOPTKP lebih dari satu kali.

Ketidakkonsistenan pengenaan NJOPTKP ini berdampak pada kesalahan perhitungan PBB-P2 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Ketidakkonsistenan Pengenaan NJOPTKP

No	Kecamatan	Pengenaan Sesuai	Tidak Dikenakan NJOPTKP	NJOPTKP lebih dari Satu Kali
1.	Kecamatan Angkona	302	1.808	4
2.	Kecamatan Bura	498	1.417	83
3.	Kecamatan Kalaena	332	566	43
4.	Kecamatan Malili	317	1.312	51
5.	Kecamatan Mangkutana	206	827	19
6.	Kecamatan Nuha	33	216	35
7.	Kecamatan Tomoni	353	851	55
8.	Kecamatan Tomoni Timur	200	826	1
9.	Kecamatan Towuti	818	853	36
10.	Kecamatan Wasuponda	118	538	14
11.	Kecamatan Wotu	276	1.644	19

Ket: Berdasarkan jumlah Wajib Pajak

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-P2 dengan dasar pengenaan pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

Kepala Subbidang Penagihan PAD dan PBB-P2 menjelaskan bahwa pengenaan pajak masih dilakukan per objek pajak. Hal ini karena Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) masih menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) dan bukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Wajib Pajak sebagai dasar pengenaan NJOPTKP. Selain itu, SISMIOP hanya mengenakan Wajib Pajak yang memiliki bumi dan bangunan saja untuk pengenaan NJOPTKP sedangkan Wajib Pajak yang hanya memiliki tanah tidak dikenakan NJOPTKP. Hasil konfirmasi lebih lanjut, pendataan

pajak pada SISMIOP belum bisa dilakukan per subjek pajak karena NIK yang belum dimutakhirkan. Pada tahun 2021, Bidang Penagihan PAD dan PBB-P2 melakukan pemutakhiran NIK namun terbatas pada saat Wajib Pajak melakukan transaksi pajak seperti pengajuan objek pajak baru serta mutasi subjek dan objek pajak. Belum terdapat kerja sama antara BPKD dengan Disdukcapil terkait pemutakhiran data Wajib Pajak berdasarkan NIK.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa besarnya NJOP Tidak Kena Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak;
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Luwu Timur Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan (kelebihan atau kekurangan) dalam penetapan besaran PBB-P2 yang ditagihkan kepada Wajib Pajak.

Hal tersebut disebabkan Kepala Subbidang Penagihan PAD dan PBB-P2 belum melakukan validasi data di aplikasi SISMIOP dengan menggunakan NIK.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menerima temuan BPK. Terkait basis data SISMIOP PBB-P2 yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Palopo dalam hal penetapan NJOPTKP atas subjek pajak dengan nama yang sama untuk beberapa objek, ID subjek yang digunakan masih mengacu pada NOP dan bukan NIK, sehingga sistem tidak dapat mengidentifikasi secara otomatis jika objek tersebut merupakan subjek pajak yang sama. Oleh karena itu akan dilakukan langkah-langkah berikut ini:

- a. Untuk penyesuaian NIK, akan dilakukan hanya ketika ada pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek pajak melalui pelayanan
- b. Melakukan validasi SISMIOP pada subjek pajak mengacu pada NIK, melalui pemutakhiran lapangan.

Terkait realisasi PBB-P2 pada tahun 2021, masih mengadopsi aplikasi SISMIOP dari KPP Pratama, sehingga secara proses bisnis masih sesuai dengan alur di KPP Pratama yang menggunakan NJOPTKP terhadap objek pajak yang memiliki bangunan saja. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena jika NJOPTKP ditetapkan sebagai faktor pengurang NJOP maka akan ada potensi penurunan penerimaan pajak daerah.

Terhadap temuan BPK, akan dilakukan penyesuaian alur dan prosedur pada aplikasi SISMIOP.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur untuk:

- a. Memutakhirkan data SISMIOP dengan data NIK Wajib Pajak menurut masing-masing NOP; dan
- b. Mengenakan NJOPTKP secara cermat dan tepat pada perhitungan pokok PBB-P2.

C. Belanja

1. Realisasi Belanja BOS Reguler untuk Pembayaran Honorarium ASN Tidak Sesuai Peruntukan

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.663.079.397,00 dengan realisasi sebesar Rp490.019.941.161,62 (*Audited*) atau 94,66%. Realisasi tersebut di antaranya berupa Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp39.916.422.000,00 (*Audited*).

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja terhadap 187 SD dan SMP di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja dana BOS berupa pembayaran honorarium bagi ASN pada setiap sekolah dengan total pembayaran senilai Rp2.145.362.000,00.

Manajer BOS pada Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) disahkan, Dinas Pendidikan telah melakukan verifikasi kesesuaian belanja modal dimana sekolah tidak boleh menganggarkan untuk belanja modal bangunan. Namun, untuk kesesuaian belanja pegawai berupa honorarium kepada bendahara sekolah yang berstatus PNS selama tahun 2021 belum diverifikasi. Selain itu, Dinas Pendidikan belum pernah mensosialisasikan ketentuan bahwa bendahara sekolah yang berstatus ASN tidak dapat diberikan honorarium.

Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Manajer BOS TA 2021 diketahui bahwa selama ini tidak ada penetapan anggaran honorarium Bendahara BOS pada RKA Dinas Pendidikan, dan belum ada besaran honorarium Bendahara BOS pada Standar Biaya Masukan Kab. Luwu Timur, sehingga anggaran dan realisasi honorarium diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dengan persyaratan:

- a. Berstatus bukan Aparatur Sipil Negara;
- b. Tercatat pada Dapodik;
- c. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Hal tersebut mengakibatkan penggunaan Dana BOS untuk honor ASN yang tidak sesuai peruntukan.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum adanya penetapan anggaran honorarium kepada Bendahara BOS pada RKA Dinas Pendidikan;
- b. Belum ada ketentuan besaran honorarium Bendahara BOS pada Standar Biaya Masukan Kab. Luwu Timur;
- c. Tim Manajemen BOS Reguler Kabupaten Luwu Timur belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pada SD dan SMP terkait pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS, khususnya dalam penunjukan ASN sebagai bendahara BOS; dan

- d. Kepala Sekolah SD dan SMP terkait dalam menganggarkan RKAS yang bersumber dari Dana BOS Reguler dan merealisasikan belanja tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menerima temuan BPK dan akan menjadi evaluasi/koreksi serta selanjutnya berkomitmen untuk:

- a. Mengoptimalkan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan pada SD dan SMP terkait pengelolaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS; dan
- b. Memerintahkan kepada Kepala Sekolah SD dan SMP untuk tidak menganggarkan dan membayarkan Honorarium ASN pada Dana BOS.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Menganggarkan honorarium Bendahara BOS pada RKA Dinas Pendidikan;
- b. Mengusulkan penetapan standar biaya masukan untuk besaran honorarium bagi Bendahara BOS;
- c. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
- d. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan BOS kepada setiap sekolah.

2. Pembayaran Premi Asuransi Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.663.079.397,00 dengan realisasi sebesar Rp490.019.941.161,62 (*Audited*) atau 94,66%. Realisasi tersebut diantaranya berupa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp55.238.314.262,03 (*Audited*), yang merupakan realisasi untuk pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP).

Dalam rangka menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kesehatan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Palopo. Kerjasama pada Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 147.543/25/XII/PKS/PEM_LT/2020 dan Nomor 109/KTR/IX.06/1220 tanggal 8 Desember 2020.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dan validasi daftar NIK peserta jaminan kesehatan dalam data rekonsiliasi dari BPJS dengan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara *online* oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Luwu Timur diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. Penetapan Peserta PBPU dan BP yang Bukan Penduduk Kabupaten Luwu Timur
Hasil validasi NIK peserta PBPU dan BP menunjukkan terdapat peserta dengan status kependudukan "Pindah". Hal itu berarti peserta PBPU dan BP telah pindah tempat tinggal keluar dari Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 maupun sebelum tahun 2021. Atas peserta yang telah pindah dari Kabupaten

Luwu Timur tersebut, seharusnya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar Rp1.103.386.000,00 tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga terdapat ketidakhematan dalam pembayaran iuran kepesertaan BPJS dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1. 4 Pembayaran iuran Peserta PBPU dan BP Berstatus Pindah

No	Bulan	Status Kepesertaan "Pindah"			Jumlah/Ketidakhematan (Rp)
		Rutin	Susulan	Bayi Baru Lahir	
1.	Januari	1.914	-	-	66.990.000,00
2.	Februari	2.012	-	-	70.420.000,00
3.	Maret	2.122	-	-	74.270.000,00
4.	April	2.237	1	-	78.318.000,00
5.	Mei	2.380	-	-	83.300.000,00
6.	Juni	2.536	-	-	88.760.000,00
7.	Juli	2.740	-	-	95.900.000,00
8.	Agustus	2.886	-	-	101.010.000,00
9.	September	3.038	-	-	106.330.000,00
10.	Oktober	3.145	-	-	110.075.000,00
11.	November	3.218	1	-	112.653.000,00
12.	Desember	3.296	-	-	115.360.000,00
	Jumlah	31.525	2	0	1.103.386.000,00

Ket: iuran Rutin per peserta Rp35.000,00 sedangkan susulan dan bayi baru lahir Rp23.000,00

b. Penetapan Peserta PBPU dan BP yang Telah Meninggal Dunia

Hasil validasi NIK peserta PBPU dan BP menunjukkan terdapat peserta dengan status kependudukan "Meninggal". Atas hal tersebut, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan seharusnya tidak dibayarkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga terdapat ketidakhematan sebesar Rp323.073.000,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1. 5 Pembayaran iuran Peserta PBPU dan BP Berstatus Meninggal

No	Bulan	Status Kepesertaan "Meninggal"			Jumlah/Ketidakhematan (Rp)
		Rutin	Susulan	Bayi Baru Lahir	
1.	Januari	582	-	-	20.370.000,00
2.	Februari	626	-	-	21.910.000,00
3.	Maret	659	-	-	23.065.000,00
4.	April	682	-	-	23.870.000,00
5.	Mei	705	-	-	24.675.000,00
6.	Juni	754	-	-	26.390.000,00
7.	Juli	769	-	-	26.915.000,00
8.	Agustus	797	-	-	27.895.000,00
9.	September	875	-	-	30.625.000,00
10.	Oktober	907	-	-	31.745.000,00
11.	November	927	-	1	32.468.000,00
12.	Desember	947	-	-	33.145.000,00
	Jumlah	9.230	-	1	323.073.000,00

Ket: iuran Rutin per peserta Rp35.000,00 sedangkan susulan dan bayi baru lahir Rp23.000,00

c. Penetapan Peserta PBPU dan BP Berstatus Kependudukan Tidak Ditemukan pada SIAK

Hasil validasi NIK peserta PBPU dan BP menunjukkan terdapat peserta dengan status NIK "Tidak Ditemukan" pada SIAK. NIK dengan status Tidak Ditemukan pada SIAK berarti NIK tersebut merupakan NIK hasil penelusuran terhadap database SIAK dan memang tidak ditemukan datanya.

Atas hal tersebut, seharusnya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur s.d. status kependudukannya valid sehingga terdapat ketidakhematan sebesar Rp1.522.938.000,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1. 6 Pembayaran iuran Peserta PBP dan BP Berstatus Tidak Ditemukan di SIAK

No	Bulan	Status NIK Tidak Ditemukan			Jumlah Ketidakhematan (Rp)
		Rutin	Susulan	Bayi Baru Lahir	
1.	Januari	3.693	5	5	129.485.000,00
2.	Februari	3.469	0	18	121.829.000,00
3.	Maret	3.483	0	20	122.365.000,00
4.	April	3.500	0	17	122.891.000,00
5.	Mei	3.513	1	17	123.369.000,00
6.	Juni	3.525	0	25	123.950.000,00
7.	Juli	3.550	0	26	124.848.000,00
8.	Agustus	3.573	0	44	126.067.000,00
9.	September	3.720	3	47	131.350.000,00
10.	Oktober	3.754	0	40	132.310.000,00
11.	November	3.764	1	31	132.476.000,00
12.	Desember	3.751	0	31	131.998.000,00
	Jumlah	43.295	10	321	1.522.938.000,00

Ket: iuran Rutin per peserta Rp35.000,00 sedangkan susulan dan bayi baru lahir Rp23.000,00

d. Penetapan Peserta PBP dan BP Lebih dari Satu Kali

Hasil pemeriksaan atas data entitas yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa terdapat peserta PBP dan BP yang terdaftar lebih dari satu kali setiap bulannya dengan NIK yang sama. Atas hal tersebut, seharusnya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hanya satu kali dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga terdapat ketidakhematan sebesar Rp493.205.000,00 dengan perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 1. 7 Pembayaran iuran Peserta PBP dan BP Lebih dari Satu Kali

No	Bulan	Status Kepesertaan			Jumlah Ketidakhematan (Rp)
		Rutin	Susulan	Bayi Baru Lahir	
1.	Januari	34	558	48	15.128.000,00
2.	Februari	1.041	418	108	48.533.000,00
3.	Maret	1.010	536	31	48.391.000,00
4.	April	1.010	500	96	49.058.000,00
5.	Mei	1.023	660	298	57.839.000,00
6.	Juni	1.042	404	296	52.570.000,00
7.	Juli	1.101	761	647	70.919.000,00
8.	Agustus	1.079	640	360	60.765.000,00
9.	September	175	469	356	25.100.000,00
10.	Oktober	166	470	262	22.646.000,00
11.	November	139	416	107	16.894.000,00
12.	Desember	193	774	35	25.362.000,00
	Jumlah	8.013	6.606	2.644	493.205.000,00

Ket: iuran Rutin per peserta Rp35.000,00 sedangkan susulan dan bayi baru lahir Rp23.000,00

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, diketahui Dinas Kesehatan telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dalam hal pemanfaatan NIK dan data kependudukan sebagaimana tertuang dalam PKS Nomor 147.543/01/I/PKS/Pem-LT/2021 dan Nomor 440/149/Dinkes tanggal 25 Januari 2021.

Atas daftar peserta peserta PBPU dan BP yang tidak sesuai dengan status kependudukan pada aplikasi SIAK, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan menjelaskan Dinas Kesehatan belum pernah memverifikasi dan memvalidasi NIK peserta PBI yang masuk dalam daftar peserta BPJS Kabupaten Luwu Timur. Verifikasi dan validasi data baru dilakukan pada bulan Desember 2021 karena keterbatasan pegawai pada Dinas Kesehatan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan BPJS Kesehatan Cabang Palopo tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Luwu Timur dalam Rangka *Universal Health Coverage* pada:

- a. Pasal 4 ayat 2 poin b yang menyatakan bahwa Pihak Kesatu berkewajiban untuk memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda kepada Pihak Kedua telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan;
- b. Pasal 6 ayat 12 poin b yang menyatakan pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 - 1) Meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
 - 3) Pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS melalui penanggung baru.

Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakhematan pembayaran iuran peserta PBPU dan BP pada BPJS Kesehatan sebesar Rp3.442.602.000,00 (Rp1.103.386.000,00 + Rp323.073.000,00 + Rp1.522.938.000,00 + Rp493.205.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan tidak memverifikasi daftar peserta PBPU dan BP sebelum diusulkan setiap bulan kepada Kantor BPJS Kabupaten Luwu Timur.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan tidak sependapat dengan temuan BPK dan mengklarifikasi terkait kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Iuran Jaminan Kesehatan kepada Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan):

- a. Kegiatan pengendalian dan pengawasan seharusnya bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, tetapi dilakukan bersama oleh OPD terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data tidak dapat dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Kesehatan. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 147.543/01/1/PKS/Pem-LT/2021 jo. Nomor 440/149/Dinkes tanggal 25 Januari 2021, Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pihak Kedua dalam hal ini Dinas

Kesehatan mempunyai hak antara lain “Mendapatkan dan menggunakan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan (200 akses data setiap hari)”, maka untuk kepesertaan Jamkesda yang berjumlah kurang lebih 116.000 jiwa akan membutuhkan waktu yang lama.

- c. Jadi untuk memaksimalkan kegiatan verifikasi dan validasi data kepesertaan termasuk data mutasi kepesertaan (kematian dan perpindahan penduduk), sebelum dilakukan pembayaran setiap bulannya, maka sebaiknya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan setelah data valid, diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk permintaan pembayaran

BPK tidak sependapat dengan tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan karena sesuai dengan dokumen rekonsiliasi jumlah peserta PBI dengan pihak BPJS yang menjadi dasar pembayaran Iuran Jaminan Asuransi PBI, yang mewakili Pemkab Luwu Timur adalah Dinas Kesehatan. Dengan demikian Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memastikan validitas data peserta PBI tersebut.

BPK berpendapat bahwa pernyataan Kepala Dinas Kesehatan mengenai minimalnya jumlah akses Data Kependudukan ke aplikasi SIAK yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kesehatan, tidak dapat menjadi alasan yang mengurangi kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan BPJS Cabang Palopo Nomor 147.543/25/XII/PKS/PEM_LT/2020.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan agar memvalidasi secara berkala, daftar usulan peserta PBPU dan B? yang akan diusulkan setiap bulan kepada Kantor BPJS Kabupaten Luwu Timur.

3. Pemberian Beasiswa Daerah Tidak Tepat Sasaran

Pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp517.663.079.397,00 dengan realisasi sebesar Rp490.019.941.161,62 (*Audited*) atau 94,66%. Realisasi tersebut di antaranya berupa Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.732.000.000,00 (*Audited*), yang digunakan dalam kegiatan pemberian beasiswa daerah kepada mahasiswa dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah.

Dari hasil pengujian diketahui terdapat pemberian beasiswa kepada 93 orang mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penerima beasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, antara lain:

- a. belum tiga tahun tercatat sebagai Penduduk Luwu Timur sebanyak 21 orang mahasiswa;

- b. tidak memenuhi persyaratan IPK minimal sebanyak 64 orang mahasiswa;
- c. telah lulus pada semester Ganjil tahun berkenaan sebanyak 4 orang mahasiswa; dan
- d. terdapat empat mahasiswa yang tidak memenuhi sekaligus kriteria (a) dan (b).
Nilai total ketidaksesuaian tersebut adalah sebesar Rp364.000.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4.

Atas hasil pengujian ini, verifikator dan PPTK Kegiatan Beasiswa Daerah pada Dinas Pendidikan, menjelaskan bahwa:

- a. Verifikator tidak melakukan konfirmasi keabsahan dokumen *softcopy* kepada Universitas terkait kebenaran IPK;
- b. Verifikator tidak melakukan konfirmasi data kependudukan kepada Dinas Dukcapil, antara lain jangka waktu mahasiswa terdaftar sebagai penduduk Luwu Timur; dan
- c. Tidak melakukan pemantauan terhadap mahasiswa yang lulus pada semester ganjil Tahun 2021.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah pada:

- a. Pasal 5 ayat (1) Kriteria Penerima Beasiswa *Scholarship* Berprestasi sebagai berikut:
 - 1) tercatat sebagai penduduk Daerah paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 2) memiliki IPK pada perguruan tinggi dengan ketentuan:
 - a) perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi A, IPK paling kurang 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b) perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi B (sangat baik), atau sebaliknya, IPK paling kurang 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 - c) perguruan tinggi terakreditasi A dan program studi terakreditasi C (baik), atau keduanya terakreditasi B, IPK paling kurang 3,40 (tiga koma empat puluh);
 - d) perguruan tinggi terakreditasi C (baik) dan program studi terakreditasi B, atau sebaliknya, IPK paling kurang 3,50 (tiga koma lima puluh);
 - e) perguruan tinggi dan program studi keduanya terakreditasi C, IPK paling kurang 3,60 (tiga koma enam puluh);
 - f) perguruan tinggi dan program studi keduanya tidak terakreditasi, IPK paling kurang 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima); dan
 - g) memiliki prestasi pada bidang tertentu sebagai juara I-III dari kompetisi yang diselenggarakan oleh panitia setingkat provinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan piagam dan atau sertifikat asli.
- b. Pasal 15 yang menyatakan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran beasiswa daerah, Perangkat Daerah yang membidangi melakukan monitoring dan evaluasi, diantaranya:

- 1) perkembangan studi dan hasil studi penerima beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa;
- 2) penelusuran untuk menilai kesesuaian antara data atau laporan penerima beasiswa dan pelaksanaan studi penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) membuat laporan kepada instansi terkait jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran peraturan mengenai beasiswa bagi penerima beasiswa; dan
- 4) pemberian sanksi kepada penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa teguran maupun penghentian beasiswa.

Hal tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi mahasiswa lain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp364.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Tim Verifikator kegiatan Beasiswa Daerah pada Dinas Pendidikan tidak melakukan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya; dan
- b. PPTK Kegiatan Beasiswa Daerah pada Dinas pendidikan kurang cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan Beasiswa Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menerima temuan BPK dan akan menjadi evaluasi, koreksi, dan selanjutnya berkomitmen untuk:

- a. Lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas data mahasiswa;
- b. Akan melakukan konfirmasi secara menyeluruh kepada universitas;
- c. Akan melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait tahun tercatatnya mahasiswa pendaftar beasiswa sebagai penduduk Kab. Luwu Timur;
- d. Akan mengecek terhadap mahasiswa yang lulus pada semester ganjil; dan
- e. Memerintahkan kepada PPTK kegiatan beasiswa untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dan monitoring.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- a. Menginstruksikan verifikator dan PPTK untuk melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa calon penerima beasiswa dengan menggunakan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur; dan
- b. Menginstruksikan PPTK agar melakukan konfirmasi menyeluruh atas data calon penerima beasiswa kepada tiap universitas terkait.

D. Aset

Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan nilai Aset Tetap pada Neraca untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.857.058.088.011,46 (*Audited*) dan Rp2.809.410.577.288,61. Rincian atas Aset Tetap terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. 8 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	Saldo per 31 Desember 2021	Saldo per 31 Desember 2020
1.	Tanah	312.748.261.979,20	298.224.086.389,63
2.	Peralatan dan Mesin	586.635.903.665,53	532.881.362.803,61
3.	Gedung dan Bangunan	1.160.164.317.454,52	1.056.897.823.540,82
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.662.283.423.651,39	2.492.756.788.527,18
5.	Aset Tetap Lainnya	9.099.651.063,74	24.389.468.784,93
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.859.038.330,33	84.441.148.054,10
7.	Akumulasi Penyusutan	-1.943.732.508.133,25	-1.680.180.100.811,66
	Jumlah	2.857.058.088.011,46	2.809.410.577.288,61

Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur TA 2020 pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor 38.B/LHP/XIX.MKS/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, BPK mengungkapkan beberapa permasalahan pengelolaan aset tetap yaitu:

- a. Mesin dan Peralatan hasil pengadaan TA 2020 belum seluruhnya diberi label/kode barang;
- b. Terdapat Aset Tetap Mesin dan Peralatan yang tercatat dalam KIB tidak diketahui keberadaannya;
- c. Terdapat aset tetap yang tidak tercatat dalam KIB karena status kepemilikan yang tidak jelas;
- d. Terdapat aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang digunakan oleh pihak ketiga tanpa didasari perikatan/perjanjian;
- e. Terdapat 20 bidang tanah pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dan disajikan di Neraca;
- f. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak jelas penyelesaiannya senilai Rp17.988.957.931,93 dan telah dihentikan namun belum diproses penghapusannya senilai Rp6.991.643.910,00;
- g. Sebanyak 113 kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum didukung BPKB; dan
- h. Terdapat Aset Tetap Mesin dan Peralatan yang hilang namun belum diproses sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan kepada:

- a. Para kepala perangkat daerah untuk memerintahkan Pengurus Barang Pengguna supaya memberikan label kode barang pada Aset Tetap Mesin dan Peralatan dalam rangka pengamanan dan tertib administrasi;

- b. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memerintahkan Pengurus Barang menelusuri barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya serta melaporkan hasil penelusuran kepada kepala perangkat daerah terkait;
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan dan Direktur RSUD I La Galigo supaya berkoordinasi dengan Pihak pemberi hibah terkait dengan status kepemilikan barang yang diserahkan dan serah terima bukti kepemilikan barang;
- d. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melakukan pengamanan aset tetap dengan melakukan perikatan dengan masyarakat yang menghuni perumahan nelayan;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk melakukan penilaian atas bidang tanah sekolah dan Puskesmas yang belum tercatat dalam KIB dan hasilnya dipergunakan sebagai dasar pencatatan dalam KIB dan penyajian di Neraca;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk memerintahkan Pengurus Barang supaya melakukan penelusuran atas konstruksi dalam pengerjaan yang tidak jelas penyelesaiannya. Hasil penelusuran disampaikan kepada Kepala Dinas dan dipergunakan sebagai dasar pencatatan di KIB dan penyajian di Neraca;
- g. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana untuk memproses penghapusan atas konstruksi dalam pengerjaan yang dihentikan penyelesaiannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset supaya berkoordinasi dengan Pengurus Barang masing-masing perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam menelusuri dan melengkapi aset kendaraan yang tidak didukung dengan BKPB; dan
- i. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses aset tetap berupa laptop yang hilang melalui tuntutan ganti rugi di Majelis Pertimbangan TP TGR, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menindaklanjuti antara lain dengan Surat Bupati Luwu Timur Nomor 700/0195/VI/BUP tanggal 15 Juni 2021 perihal instruksi kepada:

- a. Para kepala perangkat daerah untuk memerintahkan Pengurus Barang Pengguna supaya memberikan label kode barang pada Aset Tetap Mesin dan Peralatan dalam rangka pengamanan;
- b. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk memerintahkan Pengurus Barang menelusuri barang milik daerah yang tidak diketahui keberadaannya serta melaporkan hasil penelusuran kepada kepala perangkat daerah terkait;

- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan dan Direktur RSUD I La Galigo supaya berkoordinasi dengan Pihak pemberi hibah terkait dengan status kepemilikan barang yang diserahkan dan serah terima bukti kepemilikan barang;
- d. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melakukan pengamanan aset tetap dengan melakukan perikatan dengan masyarakat yang menghuni perumahan nelayan;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kepala BPKD untuk melakukan penilaian atas bidang tanah sekolah dan Puskesmas yang belum tercatat dalam KIB dan hasilnya dipergunakan sebagai dasar pencatatan dalam KIB dan penyajian di Neraca;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk memerintahkan Pengurus Barang supaya melakukan penelusuran atas konstruksi dalam pengerjaan yang tidak jelas penyelesaiannya. Hasil penelusuran disampaikan kepada Kepala Dinas dan dipergunakan sebagai dasar pencatatan di KIB dan penyajian di Neraca;
- g. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana untuk memproses penghapusan atas konstruksi dalam pengerjaan yang dihentikan penyelesaiannya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset supaya berkoordinasi dengan Pengurus Barang masing-masing perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam menelusuri dan melengkapi aset kendaraan yang tidak didukung dengan BKPB; dan
- i. Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses aset tetap berupa laptop yang hilang melalui tuntutan ganti rugi di Majelis Pertimbangan TP TGR, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengujian atas Aset Tetap per 31 Desember 2021 melalui telaah atas KIB, konfirmasi dengan Bidang Aset BPKD dan pengurus barang OPD terkait, serta pemeriksaan dokumen diketahui bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Aset Tetap Tanah belum memiliki sertifikat

Aset Tetap Tanah yang tercatat pada KIB A adalah sebanyak 4.902 bidang tanah senilai total Rp301.981.582.432,51. Atas seluruh aset tanah tersebut diketahui belum semuanya memiliki dokumen sertifikat. Dari hasil penelusuran terdapat 593 bidang tanah senilai total Rp135.478.557.925,13 yang telah memiliki sertifikat tanah. Sehingga masih terdapat 4.311 bidang tanah senilai total Rp166.503.024.507,38 yang belum memiliki sertifikat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 9 Daftar OPD dengan Aset Tetap KIB A yang Tidak Memiliki Sertifikat

OPD	Jumlah Bidang	Total Nilai Perolehan (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.096	155.323.432.219,79

OPD	Jumlah Bidang	Total Nilai Perolehan (Rp)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.215	11.179.592.287,59
Total	4.311	166.503.024.507,38

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyimpan dan menatausahakan dokumen sertifikat tanah sebanyak 593 dokumen. Seluruh dokumen sertifikat tanah tersebut disimpan di dalam brankas yang dikelola oleh Pengurus Barang Pengelola.

- b. Terdapat aset sekolah yang belum dicatat

Berdasarkan penelusuran terhadap sekolah negeri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, diketahui terdapat 20 sekolah pada jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP yang tidak memiliki pencatatan aset tetap KIB A, KIB B, dan KIB C, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 10 Daftar Sekolah yang Tidak Memiliki Pencatatan Aset Tetap

Nama Sekolah	KIB A	KIB B	KIB C
SDN 118 BATU PUTIH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
SDN 189 UJUNG BARU	Tidak ada		
SDN 190 TADULAKO	Tidak ada		
SDN 204 KALAENA KIRI III	Tidak ada		
SDN 259 BALAMBANO	Tidak ada		
SDN 279 RANTE ANGIN	Tidak ada		
SMPN 2 KALAENA	Tidak ada		
SMPN SATAP 189 UJUNG BARU	Tidak ada		
SMPN SATAP 248 MATANO	Tidak ada		
SMPN SATAP 255 BONE PUTE	Tidak ada		
SMPN SATAP PALAURU	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA ANGKONA	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA KALAENA	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA NUHA	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA TOMONI	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA TOMONI TIMUR	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA TOWUTI	Tidak ada		
TK NEGERI PEMBINA WASUPONDA	Tidak ada		
SDN 116 MABASI			Tidak ada
SMPN SATAP PALAURU			Tidak ada

Menurut Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seluruh sekolah tersebut memiliki ruang belajar dan aktif beroperasi dalam kegiatan belajar mengajar.

- c. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin SMA/SMK belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dari hasil penelusuran atas KIB B, diketahui aset tetap 14 SMA Negeri yang masih tercatat dan belum diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. 11 Daftar sekolah SMA yang masih tercatat di KIB B

Nama sekolah	Jumlah aset tetap	Nilai aset tetap (Rp)
SMA Negeri 1 ANGKONA	21	108.280.000,00
SMA Negeri 1 BURAU	15	150.467.000,00
SMA Negeri 1 KALAENA	41	119.530.000,00
SMA Negeri 1 MALILI	12	26.045.900,00
SMA Negeri 1 MANGKUTANA	14	29.665.000,00
SMA Negeri 1 NUHA	15	11.744.000,00
SMA Negeri 1 TOMONI	14	16.097.028,57
SMA Negeri 1 TOMONI TIMUR	67	81.405.476,57
SMA Negeri 1 TOWUTI	14	58.424.500,00
SMA Negeri 1 WASUPONDA	7	118.738.648,00
SMA Negeri 1 WOTU	8	9.804.000,00
SMA Negeri 2 MALILI	18	80.162.416,07
SMK Negeri 1 MALILI	49	334.855.110,00
SMK Negeri 1 TOMONI	133	649.526.131,07
Total	428	1.794.745.210,28

Atas aset tetap ini, telah dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain – Aset Lainnya dalam rangka serah terima kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. Terdapat aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang digunakan oleh pihak ketiga tanpa didasari perikatan/perjanjian

Dari hasil penelusuran atas KIB A Dinas Pendidikan, diketahui terdapat 4 bidang tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan yang dipergunakan tanpa surat pinjam pakai sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 12 Daftar bidang tanah yang dipergunakan tanpa surat pinjam pakai

No	Kode Barang	Register	Luas (M2)	Tanggal Pengadaan	Tahun Pengadaan	Pengguna	Nilai Perolehan (Rp)
1.	1.3.1.1.1.4.2	956	448	12/31/2015	2015	TK Bina Pertiwi Margolembo	3.273.535,00
2.	1.3.1.1.1.4.2	943	724	12/31/2015	2015	TK Desa Non Blok Kec.Kalaena	3.775.687,00
3.	1.3.1.1.1.4.2	917	2104	12/31/2015	2015	TK Darna Wanita Mangkutana	8.047.631,00
4.	1.3.1.1.1.4.2	942	2532	12/31/2015	2015	TK Makarti malili	19.092.187,00

- e. Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya

Dari hasil pemeriksaan keberadaan fisik secara uji petik kepada 24 OPD, diketahui terdapat 119 unit aset tetap dengan nilai total Rp61.900.000,00 yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 13 Daftar OPD dengan Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya

OPD	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1.900.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	3.310.000,00
Dinas Kesehatan	5	39.750.000,00

OPD	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
Dinas Pertanian	100	250.000,00
Kecamatan Nuha	5	950.000,00
RSUD I Lagaligo	3	8.990.000,00
Sekretariat Daerah	2	6.750.000,00
Total	119	61.900.000,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

Pengurus Barang OPD terkait menjelaskan pada saat pemeriksaan keberadaan fisik, aset tetap tersebut tidak diketahui keberadaannya dimana. Selain itu dari pemeriksaan keberadaan fisik, diketahui terdapat 66 unit aset tetap dengan nilai total Rp17.302.069.122,00 yang dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1. 14 Daftar OPD dengan Aset Tetap dengan Kondisi Rusak Berat

OPD	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	101.700.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6	73.295.000,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	2	37.680.000,00
Dinas Kesehatan	3	497.220.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4	38.660.455,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	12.932.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	6.500.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9	1.056.127.540,00
RSUD I Lagaligo	10	18.035.000,00
Sekretariat Daerah	4	5.375.000,00
Sekretariat DPRD	3	25.150.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8	15.429.394.127,00
Total	66	17.302.069.122,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan rusak berat tersebut, seluruhnya telah dilakukan reklasifikasi ke Aset Lain-Lain – Aset Lainnya dalam rangka pencarian ulang dan penghapusan.

- f. Terdapat Aset Tetap Jalan yang belum ditetapkan di dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan ruas-ruas jalan sebagai ruas jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 187/VIII/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 340/XI/Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencatat pada daftar Aset Tetap KIB D sebanyak 1.516 ruas jalan senilai total Rp1.133.724.503.678,13, yang tersebar pada 19 OPD sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 7. Seluruh ruas jalan tersebut, antara lain diklasifikasikan pada Jalan Desa sebanyak 1.358 ruas, Jalan Kabupaten sebanyak 7 ruas, dan Jalan Lainnya sebanyak 151 ruas. Rincian dapat dilihat pada Lampiran 8.

Dari hasil penelusuran atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 187/VIII/Tahun 2016, didapatkan informasi jumlah ruas jalan yang ditetapkan status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa adalah sebanyak 1.981 ruas jalan dengan panjang total 1.889,64 km. Dengan melakukan persandingan nama ruas jalan pada daftar ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dengan Lampiran Keputusan Bupati, diketahui kedua daftar tersebut tidak sama. Perbedaan terdapat pada keterangan dan lokasi ruas jalan di KIB yang tidak sepenuhnya mengacu kepada nama ruas jalan pada Keputusan Bupati.

Dengan mengacu kepada Keputusan Bupati tersebut, terdapat 465 ruas jalan yang seharusnya tercatat pada daftar Aset Tetap KIB D. Lebih lanjut dari hasil telaah terhadap Lampiran Keputusan Bupati, diketahui informasi ruas jalan tidak menyebutkan titik pengenal pangkal dan titik pengenal akhir, serta seluruh ruas jalan tidak memiliki klasifikasi sebagai Jalan Kabupaten, Jalan Strategis Kabupaten, atau sebagai Jalan Desa.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:
 - 1) Pasal 10 menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) Pada huruf f, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - b) Pada huruf g, melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
 - 2) Pasal 12 pada ayat (3) menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) Pada huruf c, melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b) Pada huruf e, mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c) Pada huruf i, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d) Pada huruf j, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
 - 3) Pasal 16 pada ayat (2) menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a) Pada huruf c, melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

- b) Pada huruf d, membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c) Pada huruf q, melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
- 4) Pasal 296 pada:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.
- 5) Pasal 299 pada:
- a) ayat (1) menyatakan bahwa pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan c. melakukan penjagaan; dan
 - b) Pengamanan hukum dilakukan terhadap: a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan pada Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan Penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten/kota dan jalan desa dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penyalahgunaan dan/atau kehilangan atas:
 - 1) Aset Tetap Tanah yang belum didukung sertifikat,
 - 2) Aset Tetap Tanah yang dimanfaatkan pihak lain tanpa didukung dengan perikatan/perjanjian yang memadai, dan
 - 3) Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum tercatat;
- b. Penyajian nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan kategori jalan kabupaten dan jalan desa, pada Neraca per 31 Desember 2021 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- c. Aset dengan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan belum diusulkan penghapusannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala OPD selaku pengguna barang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan aset tetap serta penilaian atas Barang Milik Daerah;
- b. Masing-masing Kepala OPD selaku Pengguna Barang, Kepala Bidang Aset selaku Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, serta Pengurus Barang OPD terkait belum sepenuhnya melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah secara memadai pada masing-masing OPD terkait pencatatan, inventarisasi dan pengamanan aset tetap yang berada dalam penguasaannya;

- c. Masing-masing Kepala OPD sebagai Pengguna Barang belum melakukan usulan penghapusan atas Aset Tetap dalam kondisi rusak berat;
- d. Masing-masing Pengurus Barang OPD belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab penatausahaan BMD sesuai Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu Timur; dan
- e. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa belum sepenuhnya mengacu kepada Permen PU Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD selaku Pejabat Penatausahaan Barang menerima temuan BPK dan berkomitmen untuk:

- a. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan BPN Malili dalam rangka percepatan pensertifikatan, dan dengan Kementerian Keuangan sebagai pengelola BMN Tanah di Bawah Jalan;
- b. Akan membuat tim untuk melakukan inventarisasi/penatausahaan kembali barang pada sekolah tersebut bersama dengan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur;
- c. Akan segera berkoordinasi dengan Bidang Aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemisahan pencatatan aset SMA dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur atas status tanah tersebut dan melakukan perikatan/perjanjian hibah atau pinjam pakai;
- e. Akan membentuk tim untuk melakukan inventarisasi pada enam OPD terkait barang yang tidak diketahui keberadaannya, melakukan proses penghapusan dari daftar barang, serta barang dalam kondisi rusak berat untuk dilakukan pemeliharaan ataupun diusulkan untuk proses penghapusan; dan
- f. Akan ditindaklanjuti dan ditelaah lebih dalam oleh tim inventarisasi BMD Kab. Luwu Timur.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:

- a. Melakukan inventarisasi atas seluruh aset tanah pada KIB A, membuat jadwal/perencanaan pengurusan sertifikat tanah, dan menganggarkan biaya pensertifikatan tanah serta biaya pembuatan papan nama tanah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang agar:
 - 1) Menelusuri aset sekolah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang belum tercatat pada KIB A, KIB B dan KIB C, serta mengukur, menilai, dan mencatat pada masing-masing KIB;
 - 2) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan serah terima aset SMA kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - 3) Melakukan inventarisasi atas bidang tanah yang dipergunakan oleh pihak ketiga dan membuat perikatan/perjanjian hibah atau pinjam pakai;

- c. Menginstruksikan seluruh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang untuk menginventarisasi dan memverifikasi data Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, yang rusak berat dan tidak dapat direkondisi untuk selanjutnya mengusulkan penghapusan BMD; dan
- d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang untuk mengusulkan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya dalam Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 340/XI/Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, BPK memantau tindak lanjut Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2021. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Kabupaten Luwu Timur terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP s.d. Semester II 2021

No.	Tahun Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Sesuai dengan Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut		
					Belum Sesuai dan dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Diindak lanjut	Tidak Dapat Diindak lanjut dengan alasan yang sah
1	2021	11	26	15	11	0	0
2	2020	8	22	19	3	0	0
3	2019	23	47	22	7	18	0
4	2018	6	10	10	0	0	0
5	2017	7	21	20	1	0	0
6	2016	9	26	26	0	0	0
7	2015	11	22	22	0	0	0
8	2014	34	123	120	2	1	0
9	2013	11	28	28	0	0	0
10	2012	10	20	20	0	0	0
11	2011	26	65	64	0	0	1
12	2010	11	36	36	0	0	0
13	2009	17	48	44	2	0	2
14	2008	27	63	61	1	0	1
15	2007	20	30	30	0	0	0
16	2006	7	14	14	0	0	0
17	2005	27	56	54	2	0	0
	Total	265	657	605	29	19	4
			Tingkat Penyelesaian	92,09%	4,41%	2,89%	0,61%

Sumber: IHPS Semester II 2021

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tersebut dilaksanakan atas 23 (dua puluh tiga) LHP, dengan jumlah temuan sebanyak 265 temuan senilai Rp81.447.679.306,04 dan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 657 rekomendasi dengan nilai Rp51.697.870.883,39 sampai dengan periode Semester II Tahun 2021 status TL terdiri dari:

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 605 rekomendasi dengan nilai total Rp47.191.933.809,29;
2. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 29 rekomendasi dengan nilai total Rp2.137.166.988,96;

3. Belum ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi dengan nilai total Rp127.236.866,14; dan
 4. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak empat rekomendasi dengan nilai total Rp2.241.533.219,00.
- Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain, terkait dengan temuan:

1. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Rumah Susun Sederhana Sewa Tidak Memadai
 - a. Bupati telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman untuk menyusun regulasi yang mengatur pengelolaan rusunawa secara komprehensif; dan
 - b. Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Sumasang Desa Sorowako Kecamatan Nuha.
2. Terdapat Kesalahan Penganggaran atas Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Mahasiswa Kurang Mampu pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp6.156.000.000,00 dan Pengendalian atas Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Belum Sepenuhnya Memadai
 - a. Bupati telah memberi Instruksi kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui surat Nomor 700/0199/VI/BUP tanggal 15 Juni 2021 yang isinya menginstruksikan supaya lebih cermat dalam menyusun dan mengusulkan anggaran bantuan pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu, sesuai substansinya;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan memberi Instruksi kepada Panitia Seleksi Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya bagi Mahasiswa Kurang Mampu, melalui surat Nomor No. 005/341/IV/Disdik-LT agar memasukkan syarat bukti pembayaran biaya pendidikan dan lebih cermat dalam menyusun melakukan verifikasi calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan;
 - c. Panitia Seleksi Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya bagi Mahasiswa Kurang Mampu, menyatakan dalam surat No. 005/342/VII/Disdik-LT bahwa akan memasukkan syarat bukti pembayaran biaya pendidikan dan lebih cermat dalam menyusun melakukan verifikasi calon penerima beasiswa dan bantuan pendidikan.
3. Terdapat Penganggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 Tidak Sesuai Dengan Substansinya
 - a. Bupati telah memberi Instruksi kepada Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Direktur RSUD I La Galigo, melalui surat Nomor 700/0202/VI/ BUP tanggal 15 Juni 2021, supaya lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja sesuai substansinya selaku pengguna anggaran;

- b. Bupati telah memberi Instruksi kepada TAPD melalui surat Nomor 700/0202/VI/BUP tanggal 15 Juni, supaya lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Saldo Piutang Lainnya Senilai Rp2.744.800.000,00 Belum Didukung Bukti Yang Memadai;
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Memiliki SOP dan Renops Kegiatan Testing dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan;
3. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Menyediakan Jejaring Laboratorium Secara Memadai;
4. Penatalaksanaan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Memadai;
5. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Memiliki SOP dan Renops Kegiatan Tracing Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan;
6. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Melakukan Langkah-Langkah Penemuan Kasus Secara Memadai;
7. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Memiliki SOP dan Renops Kegiatan Treatment dalam Penanganan COVID-19 Bidang Kesehatan;
8. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Melaksanakan Tahapan Manajemen Klinis Secara Memadai;
9. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Melakukan Tahapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Secara Memadai;
10. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Memiliki SOP dan Renops Kegiatan Vaksinasi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan; dan
11. Kegiatan Vaksinasi di Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Secara Efektif.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja

SKPD	Program	Kegiatan	Subsidi	Keterangan Akun yang digunakan	Revisi	Rancangan pada DPA	Realisasi	Keterangan SP	Revisi	Seharusnya	Keterangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Belanja Subsidi	Belanja Subsidi kepada BUMN	Belanja Subsidi kepada BUMN	200.000.000,00	199.095.000,00	Pembayaran pembelian token listrik yang ditujukan kepada warga kurang mampu	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.656.000.000,00	1.358.839.678,00	Rehab Tanggul Ji. M Natar Ing Batu Merah Keg. Pemb dan pengemb infrastruktur kawasan perm di kawasan strategis daerah Kab/Kota	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
Dinas Pendidikan	Pembelajaran Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.052.264.800,00	1.052.264.800,00	Pembayaran honorarium kepada pegawai SD Swasta	Belanja Hibah	Belanja Hibah - Belanja Hibah Masyarakat/Swasta	Belanja Hibah - Belanja Hibah Masyarakat/Swasta - Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.223.036.200,00	1.223.036.200,00	Pembayaran honorarium kepada pegawai SMP Swasta	Belanja Hibah	Belanja Hibah - Belanja Hibah Masyarakat/Swasta	Belanja Hibah - Belanja Hibah Masyarakat/Swasta - Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidk dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Jasa Kantor	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.036.449.000,00	2.036.449.000,00	Pembayaran honorarium kepada pegawai TK Swasta	Belanja Hibah	Belanja Hibah - Belanja Hibah Masyarakat/Swasta	Belanja Hibah - Belanja Hibah Masyarakat/Swasta - Belanja Hibah Kepada Sekolah Swasta
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	183.492.874,37	183.492.874,37	Pembangunan Gudang Kantor	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	Rak penyimpanan Barang	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyeenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	106.019.000,00	106.019.000,00	Rehab bangunan gedung kantor	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor
						Total	6.487.261.874,37	6.189.196.552,37			

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap

SKPD	Rek. Belanja Awal	Pencatatan Aset Tetap	Keterangan	Nilai
Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Tanah				
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Jalan Lainnya	Tanah	Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT	183.819.300,00
Dinas Kesehatan	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Tanah	pematangan lahan pembangunan Rumah Sakit Atue	1.379.976.801,27
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tanah	Penimbunan Lantai Jemur 1029,32 M3 TA. 202	199.402.426,00
Total keseluruhan Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Tanah				1.763.198.527,27
Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin				
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split 1 PK	233.158.500,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Ac Central	171.619.200,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Ac Central	272.700.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Exhouspen	5.081.670,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Exhouspen	4.704.480,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Exhouspen	414.216,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Fail Alrm	53.840.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Nurse call	40.824.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Tabung Pemadam 5 Kg	33.885.740,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	X-Ray Viewer	53.625.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	instrumen Cabinet	167.025.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Information Fanel	26.446.883,40
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Opration Timer	53.046.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Wastafel	485.000.000,00

SKPD	Rek Belanja Awal	Pencatatan Aset Tetap	Kegiatan	Nilai
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Elevator Lift	1.298.000.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Alat Pemadam	28.520.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split	48.055.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split	39.060.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split	90.594.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split	41.496.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split	13.251.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Split	14.007.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Central	14.469.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Central	75.492.900,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Central	104.420.400,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Central	26.274.150,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Central	56.370.300,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	AC Central	59.031.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Outdoor Multi V 5 Pro	252.088.120,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Outdoor Multi V 5 Pro	467.076.480,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Peralatan dan Mesin	Lift	866.250.000,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33

SKPD	Rek. Belanja Awal	Pencatatan Aset Tetap	Kegiatan	Nilai
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,33
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	Peralatan dan Mesin	Papan Pengumuman	3.949.933,38
Total belanja Modal Gedung dan Bangunan				5.155.075.039,40
Kecamatan Angkona	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	Peralatan dan Mesin	CCTV	12.675.127,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,30
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20

SKPD	Rek. Belanja Awal	Pencatatan Aset Tetap	Kegiatan	Nilai
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,20
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	15.870.484,01

SKPD	Rek. Belanja Awa	Pencatatan Aset Tetap	Kemudahan	Nilai
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Peralatan dan Mesin	Lampu	3.962.106,62
Total belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi				3.105.654.909,50
Total keseluruhan Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin				3.260.725.943,90
Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan				
Dinas Perhubungan	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	Gedung dan Bangunan	Pembangunan WC Terminal Tarengge	182.213.046,82
Total keseluruhan Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan				182.213.046,82
Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PENATAAN OBJEK WISATA LANDMARK	215.888.886,72
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Jalan, Irigasi dan Jaringan	PENATAAN OBJEK WISATA LANDMARK	215.739.728,60

SKPD	Rek. Belanja Awal	Pencapaian Aset Tetap	Kegiatan	Nilai
Kecamatan Nuha	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Penutup Saluran Pembuang	45.119.088,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II	2.504.578.532,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Ipal/ Instalasi Jaringan Air Kotor	184.550.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Instalasi Gas Medis (Gedung Rawat Inap Mahalona 1)	762.238.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Instalasi Gas Medis (Kamar Operasi)	471.176.042,60
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pekerjaan penambahan jaringan tersier dan pemasangan sambungan rumah Pusat Niaga Malili	16.430.000,00
Puskesmas Kalaena	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	TPS Limbah B3	14.980.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Instalasi Gas Medis	179.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Taman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (Plat Duicker)	37.298.855,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Taman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (LADSKEP)	138.113.430,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Taman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS	169.850.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Modal Taman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Pedesterian Desa Nikkel	141.186.800,00
Total belanja Modal Gedung dan Bangunan				5.096.145.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pengadaan Panel induk	147.000.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Sumur Bor	1.950.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pemasangan PDAM	1.300.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pemasangan jaringan Air bersih (PDAM)	4.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pemasangan KWH	2.000.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Sumur Bor	2.000.000,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Belanja Modal Sumur Lainnya	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Sumur dengan Pompa (Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili)	199.585.139,00
Total belanja Modal Peralatan dan Mesin				368.365.139,00
Total keseluruhan Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan				5.464.510.139,00
Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal menjadi Aset Tetap Lainnya				
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tetap lainnya	Buku Seni Budaya kelas 9 (Peg.Guru)	100.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tetap lainnya	Buku Pendidikan Agama Islam kelas 7 (Peg.Guru)	101.000,00

SKPD	Rek. Belanja Awal	Pencatatan Aset Tetap	Kegiatan	Nilai
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tetap lainnya	Buku Induk Siswa	500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tetap lainnya	Buku Induk Siswa	500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tetap lainnya	Buku Induk Siswa	500.000,00
Total keseluruhan Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Lainnya				11.425.000,00
Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Menjadi Aset Tetap Tidak Berwujud				
Dinas Perhubungan	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi Blu E	18.617.500,00
Dinas Perhubungan	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi Retribusi dan Denda	58.107.500,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi Sistem Akuntansi BLUD RSUD I Lagaligo	75.000.000,00
RSUD I Lagaligo	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Aset Tidak Berwujud	Treasury Management System (TMS)	100.000.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-learning	6.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	7.055.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Website-Learning	6.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	2.000.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	2.000.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	2.000.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.950.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning paket	6.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00

SKPD	Rek. Belanja Awal	Pencatatan Aset Tetap	Kegiatan	Nilai
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.800.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00
Dinas Pendidikan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Aset Tidak Berwujud	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00
Total keseluruhan Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal menjadi Aset Tetap Tidak Berwujud				9.800.000,00

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Ase. Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
PKM Bantilang	Beban Barang dan Jasa	625.938.533,00	Instalasi Pembuang Air Limbah	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
PKM Mangkutana	Beban Barang dan Jasa	625.938.533,00	Instalasi Pembuang Air Limbah	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
PKM Mahalona	Beban Barang dan Jasa	625.938.533,00	Instalasi Pembuang Air Limbah	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	192.999.400,00	Kulkas Vaksin Refrigerator	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	19.254.000,00	Tempat Tidur Periksa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	6.512.900,00	Tempat Tidur Periksa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	19.538.700,00	Tempat Tidur Periksa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	141.420.000,00	Dopler	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	10.619.000,00	Nebulizer	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	1.697.000,00	Termometer Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	23.424.000,00	Timbangan Bayi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	27.328.000,00	Timbangan Bayi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	3.904.000,00	Timbangan Bayi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	14.544.000,00	Timbangan Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	11.652.000,00	Hecting Set	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	10.102.000,00	Ophthalmoscope	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	36.906.909,09	Otoscope	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	13.840.090,91	Otoscope	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	21.842.388,00	Brankar	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	21.842.388,00	Brankar	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	13.089.228,00	Tempat Tidur Gekonology	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	14.991.500,00	THT Set	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	2.924.200,00	Stetoskop (Bayi, Anak, Dewasa)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	3.168.000,00	Resusisator manual (Sungkup Dewasa)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	3.168.000,00	Resusisator manual (Sungkup Bayi)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	6.143.750,00	Timbangan Berdiri Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	6.143.750,00	Timbangan Berdiri Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	6.143.750,00	Timbangan Berdiri Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	1.913.296.000,00	Infan Radient Warmer	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	Tensimeter Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	Tensimeter Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	4.716.000,00	Tensimeter Roda	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	30.912.000,00	Tensi meter Digital	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	6.294.000,00	Alat Pengukur tekanan Darah/tensimeter dengan manset dewasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	8.392.000,00	Alat Pengukur tekanan Darah/tensimeter dengan manset dewasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	8.392.000,00	Alat Pengukur tekanan Darah/tensimeter dengan manset dewasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Kesehatan	Belanja Barang dan Jasa	3.147.000,00	Alat Pengukur tekanan Darah/tensimeter dengan manset dewasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.235.000,00	Tensimeter	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	Tensimeter	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	Tensimeter	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Alat Kedokteran umum lainnya	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Alat Kedokteran umum lainnya	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Alat Kedokteran umum lainnya	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	Alat Kedokteran umum lainnya	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	863.500,00	Stopwatch	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Standar Infus	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Standar Infus	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Puskesmas Parumpanai	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.407.535,06	Penataan Lapangan Pantai Lemo (Perencanaan)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	598.786,93	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (PAGAR) - (Perencanaan)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.980.666,66	Pembangunan Signage Desa Harapan Kec. Malili (Perencanaan)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.998.000,00	Pembangunan Signage Desa Harapan Kec. Malili (Pengawasan)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	724.700,00	Pembangunan Plat Duicker Jl. WR. Supratman Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	931.500,00	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Madani (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.440.000,00	Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.500.000,00	Pembangunan SPAM Desa Matompi (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.650.000,00	Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.000.000,00	Pembangunan Plat Duicker Jl. Sungai Kandora Dusun Kasindula (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.791.300,00	Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.730.000,00	Lanjutan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	Pembangunan Proteksi Sungai Dusun Mallaulu Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	Pengkerikilan Jalan Desa Mahalona (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	89.863.000,00	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.750.000,00	Pembangunan Drainase Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.750.000,00	Pembangunan Drainase Desa Pancakarsa (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.108.500,00	Peningkatan Jalan Dusun Lambatu Desa Ranteanging (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.900.000,00	Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Wanasari Kec. Angkona (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.900.000,00	Pembangunan Drainase Saluran Pembuang Jl. Abdullah Kec. Malili (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.985.000,00	Proteksi Jl. Pengkuburan Desa Bawalipu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.990.000,00	Pengkerikilan Jalan Tauncho Dusun Kebun Rame 3 Desa Mandiri (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.990.000,00	Pengkerikilan Jalan Desa Lestari (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.990.000,00	Peningkatan Jalan Desa Pertasi Kencana (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.985.000,00	Proteksi Desa Tabaroge (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.985.000,00	Pengerasan Jalan Desa Ceridana Hijau (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.990.000,00	Peningkatan Jalan Dusun Malela Desa Margolembo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.985.000,00	Pembangunan Proteksi Desa Kalaena (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.985.000,00	Pengkerikilan Jalan Langgiri Desa Madani (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pengkerikilan Jalan Dusun Laoli Desa Harapan (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Peningkatan Badan Jalan Menuju Objek Wisata Tompo Tikka Desa Ussu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pengerasan Jalan RT.3 Dusun Lembah Desa Tarabbi (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pengerasan Jl. Maitara Atas Desa Asuli (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.348.600,00	Peningkatan Jalan Lr.11 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung RUAS 1 (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.127.000,00	Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.391.000,00	Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.244.156,70	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MADANI (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.244.156,70	PEMBANGUNAN DRAINASE + PLAT DUICKER JL. RAJAWALI - JALAN GARUDA DUSUN LEMBO TENGAH DESA WASUPONDA (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.381.100,00	Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek-Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek-Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.478.000,00	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Madani Kec. Wotu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.485.000,00	Pembangunan Drainase Dusun Balimas (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.472.600,00	Penimbunan Jalan Pisang Seberang Sungai Dusun Rende Haka (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.494.800,00	Peningkatan Jalan Desa Lera (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Pengerasan Jalan Jl. Tupai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.700.333,99	Pembangunan Drainase Desa Lera (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.970.800,00	Pengkerikilan Dalam Desa Wonorejo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	Peningkatan Jalan Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	Pengerasan Jalan Dusun Puncak Desa Tarabbi (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	Pembentukan Jl. Bayam Desa Wawondula (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.100.000,00	Pembangunan Drainase Desa Loeha (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.250.000,00	Pembangunan Proteksi Sungai Laoli Desa Harapan (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.250.000,00	Pembangunan Jaringan air bersih dusun Kotine (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Karambua (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase batas desa Sumber Alam - Mandiri dusun Harapan Makmur (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Desa Batu Putih (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan drainase Blok D Desa Libukang mandiri Kec Towuti (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase blok B Desa Libukang mandiri kec Towuti (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole kec Towuti (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Blok C desa libukang mandiri kec Towuti (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.223.577,51	Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona kec Towuti (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.520.000,00	Pembangunan Drainase Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.520.000,00	Pembangunan Drainase Desa Lagego (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.579.000,00	Pembuatan Talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.885.000,00	Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.884.700,00	Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Drainase Kantor Dinas PUPR (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.968.500,00	Pembangunan Drainase Lingkungan Bulu-Bulu Kecamatan Tomoni (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.912.000,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa Desa Kalaena Kec. Wotu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.970.250,00	Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.966.950,00	Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.970.250,00	Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.970.250,00	Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.970.250,00	Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Proteksi Dusun Batangge Desa Lagego (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek-Belanja Awal	Nila	Aset Tetap	Rek-Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Desa Buangin (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Lanjutan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha) (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.500.000,00	Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.487.500,00	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 2 (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Lanjutan Bronjong Dusun Lowu Timur Desa Tabarano (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.770.000,00	Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Lining Pembuang kampung KB desa Pertasi Kencana (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Lanjutan Pembangunan Bronjong Desa Ussu (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Intake Irigasi Desa Kalpataru (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.900.000,00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.685.000,00	Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.500.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole) (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.877.000,00	Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.000.000,00	Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	Pembangunan Proteksi Sisi Kiri Wilayah Pantai Desa Lakawali Pantai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.372.000,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.881.400,00	Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.385.000,00	Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.462.500,00	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 1 (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.447.000,00	Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.950.000,00	Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.934.700,00	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	34.994.600,00	Pembangunan Jembatan Desa Kawata (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	89.784.000,00	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.095.681,00	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (Plat Duicker) (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.057.183,00	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (LADSKEP) (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.915.940,97	Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.096.945,20	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel (By. Perencanaan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	718.500,00	Pembangunan Plat Duicker JL. WR. Supratman Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	931.500,00	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Madani (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.500.000,00	Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.500.000,00	Pembangunan SPAM Desa Matompi (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.650.000,00	Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.000.000,00	Pembangunan Plat Duicker Jl. Sungai Kandora Dusun Kasindula (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.543.250,00	Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.730.000,00	Lanjutan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.994.718,44	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA KALPATARU (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	Pembangunan Proteksi Sungai Dusun Mallaulu Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.000.000,00	Pengkerikilan Jalan Desa Mahalona (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.472.000,00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.750.000,00	Pembangunan Drainase Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.750.000,00	Pembangunan Drainase Desa Pancakarsa (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.528.250,00	Peningkatan Jalan Dusun Lambatu Desa Ranteanging (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.900.000,00	Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Wanasari Kec. Angkona (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.900.000,00	Pembangunan Drainase Saluran Pembuang Jl. Abdullah Kec. Malili (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Proteksi Jl. Pengkuburan Desa Bawalipu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.995.000,00	Pengkerikilan Jalan Tauncho Dusun Kebun Rame 3 Desa Mandiri (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.995.000,00	Pengkerikilan Jalan Desa Lestari (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.995.000,00	Peningkatan Jalan Desa Pertasi Kencana (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Proteksi Desa Tabaroge (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pengerasan Jalan Desa Cendana Hijau (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.995.000,00	Peningkatan Jalan Dusun Malela Desa Margolembo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pembangunan Proteksi Desa Kalaena (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pengkerikilan Jalan Langgiri Desa Madani (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.986.628,00	Pengkerikilan Jalan Dusun Laoli Desa Harapan (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.986.628,00	Peningkatan Badan Jalan Menuju Objek Wisata Tompo Tikka Desa Ussu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.986.628,00	Pengerasan Jalan RT. 3 Dusun Lembah Desa Tarabbi (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.000.000,00	Pengerasan Jl. Maitara Atas Desa Asuli (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.699.827,00	Peningkatan Jalan Lr. 11 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung RUAS 1 (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.117.650,00	Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.193.400,00	Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek-Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek-Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.481.052,03	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MADANI (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.481.052,03	PEMBANGUNAN DRAINASE + PLAT DUICKER JL. RAJAWALI - JALAN GARUDA DUSUN LEMBO TENGAH DESA WASUPONDA (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.456.150,00	Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.400.000,00	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Madani Kec. Wotu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.485.000,00	Pembangunan Drainase Dusun Balimas (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Penimbunan Jalan Pisang Seberang Sungai Dusun Rende Haka (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Peningkatan Jalan Desa Lera (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Pengerasan Jalan Jl. Tupai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.963.626,86	Pembangunan Drainase Desa Lera (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.978.300,00	Pengkerikilan Dalam Desa Wonorejo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	Peningkatan Jalan Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	Pengerasan Jalan Dusun Puncak Desa Tarabbi (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	Pembentukan Jl. Bayam Desa Wawondula (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.100.000,00	Pembangunan Drainase Desa Loeha (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.456.150,00	Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.250.000,00	Pembangunan Proteksi Sungai Laoli Desa Harapan (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.274.000,00	Pembangunan Jaringan air bersih dusun Kotine (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.250.000,00	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Karambua (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,96	Pembangunan Drainase batas desa Sumber Alam - Mandiri dusun Harapan Makmur (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,96	Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,96	Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan Drainase Desa Batu Putih (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan drainase Blok D Desa Libukang mandiri Kec Towuti (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan Drainase blok B Desa Libukang mandiri kec Towuti (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole kec Towuti (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan Drainase Blok C desa libukang mandiri kec Towuti (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.515.140,97	Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona kec Towuti (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.520.000,00	Pembangunan Drainase Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.520.000,00	Pembangunan Drainase Desa Lagego (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.910.000,00	Pembuatan Talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.658.400,00	Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.683.000,00	Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.718.500,00	Pembangunan Drainase Kantor Dinas PUPR (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Ase/ Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.900.000,00	Pembangunan Drainase Lingkungan Bulu-Bulu Kecamatan Tomoni (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.976.000,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalaena Kec. Wotu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.910.000,00	Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.910.000,00	Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.910.000,00	Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.910.000,00	Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.910.000,00	Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.944.800,00	Pengerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.966.950,00	Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.976.000,00	Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.977.000,00	Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.977.000,00	Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.962.000,00	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.966.950,00	Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Proteksi Dusur, Batangnge Desa Lagego (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Sebenarnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Desa Buangin (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Lanjutan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa Desa Manggala (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha) (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.375.000,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa Desa Asana (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.940.000,00	Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.500.000,00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipa Desa Balo - Palo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.481.100,00	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 2 (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Asst. Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.594.000,00	Lanjutan Bronjong Dusun Lowu Timur Desa Tabarano (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.610.000,00	Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.610.000,00	Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Lining Pembuang kampung KB desa Pertasi Kencana (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Lanjutan Pembangunan Bronjong Desa Ussu (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Intake Irigasi Desa Kalpataru (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.300.000,00	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.864.999,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.911.000,00	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.801.800,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole) (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.380.000,00	Peningkatan Jalan A. Hasan (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.434.500,00	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.500.000,00	Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.705.000,00	Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.000.000,00	Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.690.000,00	Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.700.000,00	Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.801.800,00	Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	Pembangunan Proteksi Sisi Kiri Wilayah Pantai Desa Lakawali Pantai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.551.001,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.440.000,00	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.920.000,00	Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	44.596.200,00	Peningkatan Jalan Desa Kalaena. (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	44.760.000,00	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.380.000,00	Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.443.300,00	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 1 (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	46.201.200,00	Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	49.239.750,00	Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.558.200,00	Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	59.374.200,00	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	59.679.400,00	Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	59.717.900,00	Jalan Kabupaten Kolektor Spesifikasi : Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua. (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.816.700,00	Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.917.140,00	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek-Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek-Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.620.125,00	Pembangunan Jembatan Desa Kawata (By. Pengawasan)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.956.333,34	Perencanaan Paket 18 CK (Perencanaan Pembangunan TPS3R Desa Lioka (17,956,333,34)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.956.333,33	Perencanaan Paket 18 CK Pembangunan TPS3R Desa Tarengge (17,956,333,33)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.956.333,33	Perencanaan Paket 18 CK Pembangunan TPS3R Desa Lakawali (17,956,333,33)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	130.120.000,00	Perencanaan Teknis Paket 10 SDA (Lanjutan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Malili CV. JINAN WALITAMA	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.510.000,00	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA (Pembangunan Bronjong Dusun Marannu Desa Lambara Harapan (16,510,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.545.000,00	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Bronjong Dusun 1 Kanawatu (10,545,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.411.000,00	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Lining Saluran Pembuang Dusun Karang Anyar Desa Mulyasri (4,411,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.411.000,00	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Lr.7 Desa Margomulyo	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.440.000,00	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Bronjong Desa Madani (4,440,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.260.000,00	Perencanaan Teknis Paket 11 SDA (Pembangunan Bronjong sungai La sio-sio Dusun Puncak (37,260,000) CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.490.000,00	Perencanaan Teknis Paket 11 SDA Pembangunan Proteksi Sungai Angkona Desa Watangpanua (4,490,000) CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.770.000,00	Perencanaan Teknis Paket 14 SDA (Pembangunan Bronjong Dusun Korondeme (13,770,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.000.000,00	Perencanaan Teknis Paket 14 SDA Pembangunan Proteksi Sungai Magege Dusun Sendang Sari 1 Desa wonorejo (11,000,000),	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis Paket 14 SDA Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Margolembo (5,400,000) CV. DLUNA ENGINEERING	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.411.250,00	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA (Pembangunan Bronjong Desa Pekalao (5,411,250) PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.662.750,00	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA Pembangunan Bronjong Dusun Waomeusa (12,662,750) PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.712.500,00	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA, Pembangunan Bronjong RT 01 dan RT 02 Balambano (9,712,500) PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.403.500,00	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA Pembangunan Talud Dusun Lahumpangi Timur PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.852.900,00	Pembayaran 100% CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN) Perencanaan Teknis (DED) Paket 6 BM Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.500.000,00	perencanaan Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.914.800,00	Pembayaran 100% CV. ALFA GRAHA) Perencanaan Teknis (DED) Paket 23 BM Lanjutan Peningkatan Jalan Loppe Desa Lampenai (70.914,800)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	87.474.200,00	Pembayaran 100% Paket 32 BM CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA (Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo)(Ruas Maliwowo 2) (87.474.200)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	87.600.700,00	Perencanaan Teknis Paket 21 BM (CV. JINAN WALITAMA KONSULTAN) Peningkatan Jalan Ruas Tole-Tole Landangi)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.385.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Jalan Ambo Ngaru Desa Laskap	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.385.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Peningkatan Jalan Menuju Pekuburan Palanteo Dusun Cerekang Desa Manurung	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.035.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Pengerasan Jalan Wonorejo Timur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.385.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Pembentukan dan Pengerasan Jalan Desa Tadulako dan Pepuro	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.385.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Peningkatan Jalan Lorong 5 Dusun Wanasari Desa Cendana Hitam	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.339.400,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pengerasan Jalan Dusun Martasari dan Martaguna Desa Mantadulu	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.339.400,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pengerasan Jalan Dusun Gentabuana Desa Taripa	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.339.400,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pembentukan Jalan Dusun Watampunua Desa Lamaeto	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.339.400,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Sidodadi Desa Solo	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.339.400,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Lanjutan Peningkatan Jalan, Desa Tampinna	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.343.800,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Peningkatan Jalan Dalam Pemukiman Desa Sumber Agung	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.343.800,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Peningkatan Jalan Lr.12 Desa Sumber Makmur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.343.800,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Lanjutan Pembangunan Proteksi Jalan Lorong Lerengkume Dusun Wulasi	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.343.800,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Lanjutan Pengerasan Jalan Dusun Lembah ke Dusun Tengkositara Desa Tarabbi	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.343.800,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Susuejaya dan Dusun Tirtokencono Desa Lakawali	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nija	Aset Tetap	Rek. Belanja Seharusnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	36.007.400,00	Perencanaan Teknis Paket 37 BM (CV. MASERENPULU CONSULTAN) Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Labose Desa Laskap	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.817.700,00	Perencanaan Teknis BM (CV. KHA LINE KONSULTAN Peningkatan Jalan Kontara Desa Wowundula	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.507.600,00	Perencanaan Teknis BM (CV. ALFA GRAHA) Lanjutan Peningkatan Jalan Kontara Desa Wowundula	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	27.778.300,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pengerasan Jalan Dusun Bonepute Desa Nuha	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Buangin	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Malindoe Desa Lioka	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.600.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Jl. Pontara Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.050.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pengerasan Jalan Desa Timampu	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.050.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pengerasan Jalan Jalur Dua Desa Kalosi	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.278.300,00	Perencanaan Teknis BM (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Lioka	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.949.999,00	Perencanaan Teknis BM (CV. TRAXIAL KONSULTAN) Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.050.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Cinta Damai Desa Balambano	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pembangunan Proteksi Jalan Jl. Dongi-Dongi Desa Ledu-Ledu	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.050.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pembentukan Jalan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pengerasan Jalan Dusun Lampangi Barat, Rende-Rende, Desa Parumpanai	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pengerasan Jalan Lampangi Timur ke Lampangi Barat Desa Parumpanai	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Peningkatan Jalan Akses SMP 3 Dusun Togo	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.627.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Peningkatan Jalan Dusun Togo	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.460.000,00	Perencanaan Teknis Paket 43 BM (CV. R3I KONSULTAN) Pembangunan Proteksi Desa Kalaena (10,460,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.474.700,00	Perencanaan Teknis Paket 43 BM (CV. R3I KONSULTAN) Peningkatan Jalan Kelurahan Magani (4,474,700)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.375.000,00	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN Pengerasan Jalan Desa Tabaroge	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.375.000,00	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN Pengerasan Jalan Dusun Langgiri Desa Lampenai	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.375.000,00	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN Pengerasan Jalan Jl. Karya Marannu Desa Tarengge Timur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.375.000,00	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN Pengerasan Jl. Pajatobu Desa Tarengge Timur	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.735.100,00	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN Peningkatan Jalan Desa Lagego	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.860.000,00	Perencanaan Teknis Paket 36 (CV. AKSARA LONTARA INDONESIA Peningkatan Jalan Akses Terminal/Pusat Niaga	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.927.080,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 39 BM Pengerasan Jalan Sambea Dusun Labose Desa Laskap	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Ref. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 39 BM Peningkatan Jalan Dusun Wulasi Desa Manurung	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.100.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 39 BM Pembangunan Jalan Beton Desa Tarabbi	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Desa Manurung	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pengerasan Jalan Lorong 3 dan 4 Dusun Podomoro Desa Lakawali	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pengerasan Jalan Desa Puncak Indah (Depan Texture)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.689.700,00	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pembentukan Jalan Sungai Popong Dusun Karebbe Desa Laskap	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.689.700,00	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pembentukan Jalan Samping Gardu Induk KM 4 Dusun Balambano Desa Puncak Indah	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Puncak Indah	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.365.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Lambara	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.365.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Pembangunan Jalan Poros Desa Bone Pute	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.365.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BMPembangunan Proteksi Jalan Lorong I dan II Desa Bone Pute	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.365.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Pengerasan Jalan Durian Dusun Bambalu Desa Lumbewe	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.228.200,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Pengkerikilan Jalan Masjid Raya Desa Burau	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BMPengerasan Jalan S. Begawan Solo Desa Langkea Raya	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BM Pengerasan Jalan Trans Sulawesi Desa Mahalona	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Selanjutnya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BM Peningkatan Jalan Dalam Pemukiman Desa Loeha	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.400.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BM Peningkatan Jalan Dalam Pemukiman Desa Masiku	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.140.700,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BMPeningkatan Jalan Komodo Desa Langkea Raya	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	63.665.800,00	Pembayaran 100% Paket 22 BM CV. PT. INTRA PERSADA KONSULTAN (Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari) (63.665.800)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.000.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 19 BM Pembangunan Jembatan Desa Bonepute	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.967.500,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 18 BM Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa Ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak Indah	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	46.900.000,00	Pembayaran 100% CV. KHA LINE CONSULTANT) Perencanaan Teknis (DED) Paket 51 BM Pembangunan Jembatan Akses Pekuburan Desa Mabonta (46,900.000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.500.000,00	Pembayaran 100% CV. KHA LINE CONSULTANT) Perencanaan Teknis (DED) Paket 51 BM Pembangunan Jembatan Desa Manurung - Desa Lakawali (7,500,000)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	69.447.400,00	Pembayaran 100% CV. KHA LINE CONSULTANT) Perencanaan Teknis (DED) Paket 50 BM Pembangunan Jembatan Desa Taripa	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.860.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan Jalan Poros Loppe Dusun Benteng	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.860.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan Karambua	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.810.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan penghubung desa pasi-pasi dan desa harapan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.860.000,00	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan sungai popong dusun karebbe desa laskap	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nila	Asal Tejar	Rek. Belanja Sehat Usaya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	77.371.800,00	Perencanaan Teknis Paket 53 BM (CV. PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN VETERAN UJUNG DESA LANGKEA RAYA)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	198.925.600,00	Biaya Perencanaan Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta	Belanja Gedung dan Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.326.028,76	Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.907.900,00	By. Desain Peningkatan Jalan Desa Argomulyo	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.962.900,00	By. Desain Pengaspalan Desa Balai Kembang	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.949.999,00	By. Desain Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	28.706.480,00	By. Pengawasan Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.866.100,00	By. Desain Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	44.462.000,00	Biaya Jasa Penilai Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT	Belanja Modal Tanah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	65.964.167,00	Lanjutan Peningkatan Jalan Tabarano - Lioka (Tabarano 20)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	149.731.000,00	Penataan Halaman Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ASN Luwu Timur	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.000.000,00	Biaya Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kawasule Desa Pongkeru	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.000.000,00	Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Pekuburan Islam Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.500.000,00	Biaya Supervisi Pembangunan Jalan Lingkungan Pantai Sioune Desa Pekaloea Kec. Towuti	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.500.000,00	Biaya Supervisi Pengerasan Jalan Menuju Perumahan Green Lioka Desa Lioka Kec. Towuti	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.500.000,00	Biaya Supervisi Pembangunan Paving Blok Jl. R.A Kartini Desa Puncak Indah Kec. Malili	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.000.000,00	Biaya Supervisi Rabat Beton Desa Tabarano Kec. Wasuponda	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rek. Belanja Awal	Nilai	Aset Tetap	Rek. Belanja Semuasnya
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.500.000,00	Biaya Supervisi Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Sungai Ampulili Desa Langkea Raya	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.499.000,00	Biaya Supervisi Pengkerikilan Jalan Lingkungan Dusun Tirowali Desa Timampu Kec. Towuti	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
	Total	9.094.058.071,58		

Penerima Beasiswa Daerah Yang Tidak Sesuai Kriteria Peraturan Bupati

No	Nama Mahasiswa	Beasiswa Yang Diterima	Keterangan	Nilai Beasiswa Tidak Sesuai Ketentuan
1.	Feb	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
2.	Pra	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
3.	Asm	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
4.	Ris	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
5.	Rid	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
6.	Ard	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
7.	Pus	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
8.	Isn	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
9.	AuP	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
10.	Num	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
11.	Dev	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
12.	Maw	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
13.	Nur	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
14.	Mus	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
15.	Had	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
16.	Sat	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00

No.	Nama Mahasiswa	Beasiswa Yang Diterima	Keterangan	Nilai Beasiswa Tidak Sesuai Ketentuan
17.	Wah	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
18.	Mun	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
19.	Tri	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
20.	Zai	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
21.	Ham	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur	4.000.000,00
22.	Alg	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
23.	Rdz	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
24.	Sel	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
25.	Fyq	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
26.	Eka	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
27.	Ann	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
28.	Dea	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
29.	Wiw	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
30.	Fah	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
31.	Riz	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
32.	Rus	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
33.	Yus	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
34.	Rah	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
35.	Naf	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
36.	Tik	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
37.	lkr	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
38.	Rea	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
39.	Sha	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00

No	Nama Mahasiswa	Beasiswa Yang Diterima	Keterangan	Nilai Beasiswa Tidak Sesuai Ketentuan
40.	Kar	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
41.	Raz	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
42.	Wyd	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
43.	Ang	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
44.	Niw	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
45.	Nah	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
46.	Lum	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
47.	Aqs	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
48.	Way	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
49.	Ria	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
50.	Yun	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
51.	Mau	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
52.	Sap	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
53.	Hid	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
54.	Lia	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
55.	Hmz	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
56.	Asy	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
57.	Mur	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
58.	Bac	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
59.	Day	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
60.	Ayu	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
61.	Asw	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
62.	Ger	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
63.	Zul	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
64.	Fau	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
65.	Arm	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00

No.	Nama Mahasiswa	Beasiswa Yang Diterima	Keterangan	Nilai Beasiswa Tidak Sesuai Ketentuan
66.	Nrh	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
67.	Sad	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
68.	Put	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
69.	Bad	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
70.	Nmf	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
71.	Hrv	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
72.	Gab	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
73.	Nov	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
74.	MuH	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
75.	Pat	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
76.	WyK	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
77.	BeS	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
78.	RAP	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
79.	NuA	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
80.	MES	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
81.	Asr	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
82.	Adr	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
83.	Sya	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
84.	Zac	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
85.	VeA	4.000.000,00	Tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
86.	HAW	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur dan tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
87.	MRG	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur dan tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
88.	Nul	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur dan tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00

No.	Nama Mahasiswa	Beasiswa Yang Diterima	Keterangan	Nilai Beasiswa Tidak Sesuai Keterangan
89.	TaH	4.000.000,00	Belum tiga tahun tercatat sebagai penduduk Kab. Luwu Timur dan tidak memenuhi persyaratan IPK minimal	4.000.000,00
90.	ERU	4.000.000,00	Lulus di Semester Ganjil Tahun 2021	4.000.000,00
91.	MFA	4.000.000,00	Lulus di Semester Ganjil Tahun 2021	4.000.000,00
92.	UIS	4.000.000,00	Lulus di Semester Ganjil Tahun 2021	4.000.000,00
93.	CNA	4.000.000,00	Lulus di Semester Ganjil Tahun 2021	4.000.000,00
	Total	372.000.000,00		364.000.000,00

Daftar Aset Tetap dengan Keberadaan Tidak Diketahui

No	SKPD	Kode Barang	Jenis Barang Nama Barang	Registri	Keterangan 1	Keterangan 2	Tanggal Pembelian	Nilai Perolehan Induk	Status
1	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2			10/21/2005	3.500.000,00	Tidak diketahui
2	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	5	YAMAHA	YT 115 CC	10/21/2005	13.000.000,00	Tidak diketahui
3	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	2	SUZUKI	FD 110	11/6/2005	7.750.000,00	Tidak diketahui
4	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	3	SUZUKI	FD 110	11/6/2005	7.750.000,00	Tidak diketahui
5	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	4	SUZUKI	FD 110	11/6/2005	7.750.000,00	Tidak diketahui
6	Kecamatan Nuha	1.3.5.1.1.1.3	Buku Ekonomi	1			12/12/2009	190.000,00	Tidak diketahui
7	Kecamatan Nuha	1.3.5.1.1.1.3	Buku Ekonomi	2			12/12/2009	190.000,00	Tidak diketahui
8	Kecamatan Nuha	1.3.5.1.1.1.3	Buku Hukum	3			12/12/2009	190.000,00	Tidak diketahui
9	Kecamatan Nuha	1.3.5.1.1.1.3	Buku Hukum	4			12/12/2009	190.000,00	Tidak diketahui
10	Kecamatan Nuha	1.3.5.1.1.1.3	Buku Hukum	5			12/12/2009	190.000,00	Tidak diketahui
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	71	HP	Laser Jet P110	3/15/2013	1.900.000,00	Tidak diketahui
12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	HP/Business Pro P1102		10/10/2014	1.210.000,00	Tidak diketahui
13	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	HP	Laser Jet P110	11/11/2013	1.200.000,00	Tidak diketahui
14	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	CANON	PIXMA IP2770	12/31/2010	900.000,00	Tidak diketahui
15	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	1	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
16	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	2	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
17	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	3	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
18	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	4	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
19	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	5	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
20	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	6	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
21	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	7	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
22	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	8	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
23	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	9	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
24	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	10	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
25	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	11	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
26	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	12	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
27	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	13	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
28	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	14	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
29	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	15	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
30	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	16	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
31	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	17	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
32	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	18	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
33	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	19	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
34	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	20	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
35	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	21	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui

No.	SKPD	Kode Barang	Jenis Barang Nama Barang	Regisier	Keterangan 1	Keterangan 2	Tanggal Pembelian	Nilai Perolehan	Status
110	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	96	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
111	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	97	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
112	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	98	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
113	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	99	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
114	Dinas Pertanian	1.3.2.8.1.35.40	Alat Uji Beda Warna	100	Bagan Warna daun (BWD)		12/31/2005	2.500,00	Tidak diketahui
115	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	Epson	L355	12/31/2014	3.745.000,00	Tidak diketahui
116	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Epson	L355	12/31/2014	3.745.000,00	Tidak diketahui
117	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	HP	Injek	12/31/2016	1.500.000,00	Tidak diketahui
118	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	45	Epson		5/18/2012	3.250.000,00	Tidak diketahui
119	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	60			2/16/2015	3.500.000,00	Tidak diketahui
							Total	61.900.000,00	

Daftar Aset Tetap dengan Status Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)

No	SKPD	Kode Barang	Jenis Barang Nama Barang	Register	Keterangan	Kolorangan 2	Tanggal Pembelian	Nilai Perolehan Induk	Status
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alat Musik Mode	1.3.5.2.1.1.2	1	Alat Marcing Band (Alat Tiup Trombone merek. Subaru) 4 Buah		1/7/2012	30.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alat Musik Mode	1.3.5.2.1.1.2	2	Alat Marching Band (Alat Tiup Mellophone Merek Subaru) 4 Buah		1/7/2012	28.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alat Musik Mode	1.3.5.2.1.1.2	3	Alat Marching Band (Alat Tiup Tuba Merk Subaru) 2 Buah		1/7/2012	39.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	Canon	Laser Shot LBP 6000	5/29/2015	1.350.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	80	Canon	Pixma iX6560	11/18/2015	3.350.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
6	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.4	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6	DESA MARGOLEMBO		12/31/2000	85.700.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.4	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	7	DESA MARGOLEMBO		12/31/2000	85.700.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	184	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	96.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	180	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	99.200.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
10	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	181	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	99.200.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
11	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	182	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	99.200.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	183	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	129.600.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
13	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	186	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	162.866.540,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.3.3.1.1.12.1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	185	Pasar Sentral Kec. Tomoni	Beton	12/31/1997	198.661.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)

No	SKPD	Kode Barang	Jenis Barang Nama Barang	Register	Keterangan 1	Keterangan 2	Tanggal Pembelian	Nilai Pembelian Indik	Status
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Canon MX 397		12/13/2013	1.450.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Canon Pixma	IP2770	7/30/2015	1.325.455,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Pixma IP 2770		12/6/2016	1.375.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.3.2.10.2.4.1	Server	1	Prosesor Intel Xeon	500 Sata GB	12/31/2013	34.510.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Canon Pixma		3/31/2012	3.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Canon Pixma		3/31/2012	1.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Canon		6/24/2014	1.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Canon	MP237	3/16/2015	1.500.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.3.1.1.13.1	Gedung Pos Jaga Permanen	2	Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana	Beton	12/31/1996	64.600.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.3.4.1.4.1	Pagar Permanen	1	Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana	Beton	12/31/1996	2.700.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	HP	Laser Jet P1102	2/21/2011	2.200.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	HP/Business Pro P1102		10/10/2014	1.210.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Canon/Pixma MP287	Warna	9/16/2015	1.155.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
28	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	37	HP/P1102	Laser Jet	10/16/2015	1.430.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
29	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.3.2.5.1.5.12	Mesin Absensi	1	SEcure	GV	12/31/2010	15.180.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
30	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.3.2.6.1.2.105	Layar Film/Projector	1	Toshiba	Toshiba	12/31/2005	22.500.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
31	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.1	Mobil Ambulance	8	Suzuki APV		7/13/2007	139.500.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
32	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	Suzuki	APV	7/13/2007	138.700.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
33	Dinas Kesehatan	1.3.2.2.1.6.18	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	2	Mazda	pick up	6/22/2009	219.020.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
34	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Canon	IP2770	5/13/2013	1.300.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)

No.	SKPD	Kode Barang	Jenis Barang Nama Barang	Register	Keterangan 1	Keterangan 2	Tanggal Pembelian	Harga Perolehan Indraw	Status
35	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	Canon	IP2770	5/13/2013	1.300.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
36	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Canon	IP2770	5/13/2013	1.300.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
37	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Canon	IP2770	5/13/2013	1.300.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
38	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	Epson	L355	12/31/2014	3.745.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
39	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Canon	Pixma ix6560	12/31/2015	3.630.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
40	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Canon IP 2770		12/31/2015	1.320.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
41	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Canon IP 2770		12/31/2015	1.320.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
42	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Canon IP 2770		12/31/2015	1.320.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
43	RSUD I Lagaligo	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	HP	Injek	12/31/2016	1.500.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
44	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	Epson	L120	12/3/2012	2.400.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
45	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	56	Canon	IP2770	12/31/2014	975.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
46	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	58	Canon	IP2770	2/16/2015	1.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
47	Sekretariat Daerah	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	59	Canon	IP2770	2/16/2015	1.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
48	Sekretariat DPRD	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	10		6 LG	12/21/2009	3.200.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
49	Sekretariat DPRD	1.3.2.5.2.6.2	Televisi	11		1 LG	11/27/2010	2.950.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
50	Sekretariat DPRD	1.3.2.6.1.2.3	Camera Electronic	12		3 Nikon D 90	11/22/2010	19.000.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Canon		12/31/2010	995.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Canon		12/31/2010	995.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Canon		12/31/2010	995.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Canon		12/31/2010	995.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)

No.	SKPD	Kode Barang	Jenis Barang Nama Barang	Regislar	Keterangan 1	Keterangan 2	Tanggal Pembelian	Nilai Perolehan Induk	Status
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Canon	iP6560	4/20/2015	3.480.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Canon	iP6560	4/20/2015	3.480.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	Canon	iP 2770	4/1/2015	996.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Canon	iP 2770	4/1/2015	996.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
59	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM	6	Desa Cendana Kecamatan Burau		12/31/2009	779.801.006,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
60	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	3	Desa Batuputih Kecamatan Burau		12/31/2009	1.009.690.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	7	Desa Non blok Kecamatan Kalaena		12/31/2009	1.071.238.166,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
62	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	1	Desa Kasintuwu Kecamatan mangkutana		12/31/2009	1.131.352.478,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
63	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	2	Desa Nuha Kecamatan Nuha		12/31/2009	1.355.037.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	4	Desa Mantadulu Kecamatan Angkona		12/31/2009	2.092.220.524,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
65	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.3.1	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	5	Desa Bantilang Kecamatan Towuti		12/31/2009	4.035.416.000,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
66	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.3.4.3.5.9.3	Instalasi PLTS Kapasitas Besar	1	Desa Koroncia		12/31/2009	3.954.638.953,00	Rusak Berat (Tidak Dapat Digunakan Lagi)
							Total	17.302.069.122,00	

Rekapitulasi Jumlah Ruas Jalan Pada KIB D Masing-Masing OPD

SKPD	Jumlah ruas	Nilai Perolehan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	217.479.000,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	3	406.720.990,00
Dinas Kesehatan	11	1.885.426.118,14
Dinas Lingkungan Hidup	2	399.400.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	3	580.821.615,32
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.246	1.076.894.378.855,07
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	35.000.000,00
Dinas Pendidikan	19	3.347.402.516,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	426.203.000,00
Dinas Perhubungan	4	418.804.400,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	159.500.000,00
Dinas Pertanian	5	1.051.872.250,00
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	206	43.896.998.863,60
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	2	194.748.600,00
Kecamatan Malili	2	188.091.000,00
Kecamatan Tomoni	1	168.954.500,00
RSUD I Lagaligo	2	1.588.669.016,00
Sekretariat Daerah	1	1.207.429.478,00
Sekretariat DPRD	4	656.603.476,00
Total	1.516	1.133.724.503.678,13

Rekapitulasi Jumlah Ruas Jalan Pada KIB D Per Klasifikasi Per Masing-Masing SKPD

Jenis Barang / Nama Barang	SKPD	Jumlah Ruas	Nilai Perolehan
Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.186	994.555.878.479,51
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	145	32.989.550.008,60
	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	2	194.748.600,00
Jalan Desa Lain-lain	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	4.600.403.544,32
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11	2.752.861.395,00
Jalan Kabupaten Arteri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	4.187.565.334,58
Jalan Kabupaten Lain-lain	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	32.985.584.980,00
Jalan Khusus Kompleks	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1	186.780.990,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	123.668.038,00
Jalan Khusus Lain-lain	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1	5.900.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	42.254.876,99
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	207.309.000,00
	Kecamatan Malili	1	54.468.000,00
Jalan Khusus Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	217.479.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1	214.040.000,00
	Dinas Kesehatan	11	1.885.426.118,14
	Dinas Lingkungan Hidup	1	211.900.000,00
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1	149.193.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	40.097.675.327,67
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	35.000.000,00
	Dinas Pendidikan	19	3.347.402.516,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2	426.203.000,00
	Dinas Perhubungan	4	418.804.400,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	159.500.000,00
	Dinas Pertanian	5	1.051.872.250,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48	7.866.738.460,00
	Kecamatan Malili	1	133.623.000,00
	Kecamatan Tomoni	1	168.954.500,00
	RSUD I Lagaligo	2	1.588.669.016,00
	Sekretariat Daerah	1	1.207.429.478,00
	Sekretariat DPRD	2	300.778.476,00
Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2	431.628.615,32
	Sekretariat DPRD	1	160.083.000,00
Jalan Khusus Perorangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	159.177.661,00
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	80.540.000,00
	Sekretariat DPRD	1	195.742.000,00

Jalan lainnya	Dinas Lingkungan Hidup	1	187.500.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	142.170.613,00
	Total	1.516	1.133.724.503.678,13

Rekapitulasi Tahunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

No	Tahun dan Objek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian								Nilai Penyertaan Asas atau Penyertaan Lain ke Kas Negara Daerah/Perusahaan
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan rekomendasi (TS)		Belum sesuai dan belum selesai (TB)		Belum ditindaklanjuti (BT)		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
Tahun Pemeriksaan 2005														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2004	16	1.524.061.647,00	35	1.524.061.647,00	35	1.524.061.647,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.524.061.647,00
B	PDTT													
1	Belanja Daerah 2004-2005	11	2.847.007.163,20	21	2.405.507.347,84	19	2.341.256.558,24	2	64.250.789,60	0	0,00	0	0,00	2.341.256.558,24
	Jumlah	27	4.371.068.810,20	56	3.929.568.994,84	54	3.865.318.205,24	2	64.250.789,60	0	0,00	0	0,00	3.865.318.205,24
Tahun Pemeriksaan 2006														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2005	7	112.956.899,40	14	112.956.899,40	14	112.956.899,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	112.956.899,40
	Jumlah	7	112.956.899,40	14	112.956.899,40	14	112.956.899,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00	112.956.899,40
Tahun Pemeriksaan 2007														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2006	12	1.285.546.698,90	21	1.070.014.513,90	21	1.070.014.513,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.070.014.513,90
B	PDTT													
1	Dana Perimbangan	4	582.222.510,00	5	582.222.510,00	5	582.222.510,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	582.222.510,00
2	Bantuan Kepada Partai Politik TA 2006	4	2.644.089,00	4	2.644.089,00	4	2.644.089,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.644.089,00
	Jumlah	20	1.870.413.297,90	30	1.654.881.112,90	30	1.654.881.112,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.654.881.112,90
Tahun Pemeriksaan 2008														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD TA 2007	27	21.193.999.978,49	63	20.379.965.727,49	61	19.765.692.200,49	1	430.590.000,00	0	0,00	1	183.683.527,00	19.765.692.200,49
	Jumlah	27	21.193.999.978,49	63	20.379.965.727,49	61	19.765.692.200,49	1	430.590.000,00	0	0,00	1	183.683.527,00	19.765.692.200,49
Tahun Pemeriksaan 2009														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2008	17	4.405.669.785,00	48	4.405.669.785,00	44	1.232.199.744,00	2	1.115.620.349,00	0	0,00	2	2.057.849.692,00	1.232.199.744,00
	Jumlah	17	4.405.669.785,00	48	4.405.669.785,00	44	1.232.199.744,00	2	1.115.620.349,00	0	0,00	2	2.057.849.692,00	1.232.199.744,00
Tahun Pemeriksaan 2010														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2009	11	1.153.888.099,00	36	1.093.832.551,00	36	1.093.832.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.093.832.551,00
	Jumlah	11	1.153.888.099,00	36	1.093.832.551,00	36	1.093.832.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.093.832.551,00
Tahun Pemeriksaan 2011														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2010	12	242.719.700,00	32	101.091.200,00	31	101.091.200,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	141.628.500,00
B	Kinerja													
1	Kinerja RSUD I Lagaligo	14	0,00	33	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah	26	242.719.700,00	65	101.091.200,00	64	101.091.200,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	141.628.500,00
Tahun Pemeriksaan 2012														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2011	10	36.982.446.398,46	20	14.994.436.272,46	20	14.994.436.272,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.994.436.272,46
	Jumlah	10	36.982.446.398,46	20	14.994.436.272,46	20	14.994.436.272,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14.994.436.272,46
Tahun Pemeriksaan 2013														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2012	11	124.473.390,09	28	124.473.390,12	28	124.473.390,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124.473.390,12
	Jumlah	11	124.473.390,09	28	124.473.390,12	28	124.473.390,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	124.473.390,12
Tahun Pemeriksaan 2014														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
1	LKPD 2013	23	1.457.353.147,28	66	1.457.353.150,28	63	1.009.425.733,78	2	320.690.550,36	1	127.236.866,14	0	0,00	1.009.425.733,78

No	Tahun dan Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Status Penyelesaian								Nilai Penyerahan Asot atau Penyetoran Uang Ke Kas Negara (Diporal) / Perbaikan	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan rekomendasi (TS)		Belum sesuai dan belum selesai (TB)		Belum ditindaklanjuti (BT)		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
B	POTT														
2	Belanja TA 2013-2014	11	723.388.968,49	57	601.825.676,84	57	601.825.676,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	601.825.676,84	
	Jumlah	34	2.180.742.115,77	123	2.059.178.827,12	120	1.611.251.410,62	2	320.690.550,36	1	127.236.866,14	0	0,00	1.611.251.410,62	
	Tahun Pemeriksaan 2015														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD 2014	11	608.584.738,32	22	608.584.606,78	22	608.584.606,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	608.584.606,78	
	Jumlah	11	608.584.738,32	22	608.584.606,78	22	608.584.606,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	608.584.606,78	
	Tahun Pemeriksaan 2016														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD 2015	9	1.295.518.671,89	26	561.385.816,87	26	561.385.816,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	561.385.816,87	
	Jumlah	9	1.295.518.671,89	26	561.385.816,87	26	561.385.816,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	561.385.816,87	
	Tahun Pemeriksaan 2017														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD 2016	7	1.243.061.211,00	21	1.243.061.211,00	20	1.037.045.911,00	1	206.015.300,00	0	0,00	0	0,00	1.037.045.911,00	
	Jumlah	7	1.243.061.211,00	21	1.243.061.211,00	20	1.037.045.911,00	1	206.015.300,00	0	0,00	0	0,00	1.037.045.911,00	
	Tahun Pemeriksaan 2018														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD 2017	6	696.379.032,73	10	173.174.590,00	10	173.174.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173.174.590,00	
	Jumlah	6	696.379.032,73	10	173.174.590,00	10	173.174.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173.174.590,00	
	Tahun Pemeriksaan 2019														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD 2018	9	965.804.814,24	26	0,00	22	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	965.804.814,24	
	Jumlah	9	965.804.814,24	26	0,00	22	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	965.804.814,24	
	Tahun Pemeriksaan 2020														
B	Kinerja														
1	Kinerja TA 2016-2018	14	0,00	21	0,00	0	0,00	3	0,00	18	0,00	0	0,00	0,00	
	Jumlah	23	965.804.814,24	47	0,00	22	0,00	7	0,00	18	0,00	0	0,00	965.804.814,24	
	Tahun Pemeriksaan 2021														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD 2019	8	625.672.830,41	22	175.609.898,41	19	175.609.898,41	3	0,00	0	0,00	0	0,00	631.855.784,41	
	Jumlah	8	625.672.830,41	22	175.609.898,41	19	175.609.898,41	3	0,00	0	0,00	0	0,00	631.855.784,41	
	Tahun Pemeriksaan 2021														
A	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
1	LKPD TA 2020	11	3.374.279.533,14	26	80.000.000,00	15	80.000.000,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	80.000.000,00	
	Jumlah	11	3.374.279.533,14	26	80.000.000,00	15	80.000.000,00	11	0,00	0	0,00	0	0,00	80.000.000,00	
	Jumlah Total	265	81.447.679.306,04	657	51.697.870.883,39	605	47.191.933.809,29	29	2.137.166.988,96	19	127.236.866,14	4	2.241.533.219,00	48.654.521.809,53	



BUPATI LUWU TIMUR

Jl. Soekarno- Hatta Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

MALILI, 92981

Malili, 16 Mei 2022

Nomor : 094/159/V/ITKAB
Lamp. : Satu berkas
Perihal : Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut
Rekomendasi BPK Pada Laporan Hasil
Pemeriksaan LKPD Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Prov. Sulawesi Selatan
di
Makassar

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, bersama ini disampaikan rencana aksi (*action plan*) tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Budiman, M.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili
2. Peringgal

**RENCANA AKSI (ACTION PLAN)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LKPD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**

Nomor LHP : 38.B/LHP/XIX.MKS/05/2022
 Tanggal : 16 Mei 2022
 Auditama / Perwakilan BPK : Auditama Keuangan Negara VI / BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
A	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN				
1.	Kesalahan Penganggaran atas Belanja Tahun Anggaran 2021 Senilai Rp31.281.335.648,86	BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan: a. TAPD agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran; b. Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran (PA)/KPA agar mengusulkan penganggaran dan melaksanakan realisasi belanja daerah sesuai substansinya; dan c. Para Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan Kepala Subbagian Program masing-masing OPD agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun RKA.	Memerintahkan kepada : a. TAPD agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran; b. Sekretaris Daerah, dan para Kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran (PA)/KPA agar mengusulkan penganggaran dan melaksanakan realisasi belanja daerah sesuai substansinya; dan c. Para Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan Kepala Subbagian Program masing-masing OPD agar mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun RKA.	P4 Mei 2022	
2.	Kebijakan Akuntansi Investasi, Aset Tidak Berwujud, Kewajiban, Belanja, dan Koreksi Kesalahan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Belum Sepenuhnya Dimutakhirkan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala BPKD untuk segera melakukan inventarisasi permasalahan Kebijakan Akuntansi secara menyeluruh dan mengajukan revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Memerintahkan Kepala BPKD untuk segera melakukan inventarisasi permasalahan Kebijakan Akuntansi secara menyeluruh dan mengajukan revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	P4 Mei 2022	
B	PENDAPATAN				
1.	Pengenaan NJOPTKP atas Perhitungan PBB-P2 Tidak Dapat Ditelusuri per Wajib Pajak	BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur untuk: a. Memutakhirkan data SISMIOIP dengan data NIK Wajib Pajak menurut masing-masing NOP; dan b. Mengenakan NJOPTKP secara cermat dan tepat pada perhitungan pokok PBB-P2.	Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur untuk: a. Memutakhirkan data SISMIOIP dengan data NIK Wajib Pajak menurut masing-masing NOP; dan b. Mengenakan NJOPTKP secara cermat dan tepat pada perhitungan pokok PBB-P2.	P4 Mei 2022	

NO.	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
C	BELANJA				
1.	Realisasi Belanja BOS Reguler untuk Pembayaran Honorarium ASN Tidak Sesuai Peruntukan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk: a. Menganggarkan honorarium Bendahara BOS pada RKA Dinas Pendidikan; b. Mengusulkan penetapan standar biaya masukan untuk besaran honorarium bagi Bendahara BOS; c. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan d. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan BOS kepada setiap sekolah.	Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk: a. Menganggarkan honorarium Bendahara BOS pada RKA Dinas Pendidikan; b. Mengusulkan penetapan standar biaya masukan untuk besaran honorarium bagi Bendahara BOS; c. Lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan d. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan BOS kepada setiap sekolah.	P4 Mei 2022	
2.	Pembayaran Premi Asuransi Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan agar memvalidasi secara berkala, daftar usulan peserta PBPU dan BP yang akan diusulkan setiap bulan kepada Kantor BPJS Kabupaten Luwu Timur.	Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan agar memvalidasi secara berkala, daftar usulan peserta PBPU dan BP yang akan diusulkan setiap bulan kepada Kantor BPJS Kabupaten Luwu Timur.	P4 Mei 2022	
3.	Terdapat Pemberian Beasiswa Daerah Tidak Tepat Sasaran	BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk: a. Menginstruksikan verifikator dan PPTK untuk melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa calon penerima beasiswa dengan menggunakan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur; dan b. Menginstruksikan PPTK agar melakukan konfirmasi menyeluruh atas data calon penerima beasiswa kepada tiap universitas terkait.	Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk: a. Menginstruksikan verifikator dan PPTK untuk melakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa calon penerima beasiswa dengan menggunakan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur; dan b. Menginstruksikan PPTK agar melakukan konfirmasi menyeluruh atas data calon penerima beasiswa kepada tiap universitas terkait.	P4 Mei 2022	

NO.	JUDUL TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
D	ASET				
1.	Pengelolaan Aset Tetap Belum Tertib	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Luwu Timur agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:</p> <p>a. Melakukan inventarisasi atas seluruh aset tanah pada KIB A, membuat jadwal/perencanaan pengurusan sertipikat tanah, dan menganggarkan biaya pensertipikatan tanah serta biaya pembuatan papan nama tanah sesuai kemampuan keuangan daerah;</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang agar:</p> <p>1) Menelusuri aset sekolah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang belum tercatat pada KIB A, KIB B dan KIB C, serta mengukur, menilai, dan mencatat pada masing-masing KIB;</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan serah terima aset SMA kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; dan</p> <p>3) Melakukan inventarisasi atas bidang tanah yang dipergunakan oleh pihak ketiga dan membuat perikatan/perjanjian hibah atau pinjam pakai;</p> <p>c. Menginstruksikan seluruh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang untuk menginventarisasi dan memverifikasi data Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, yang rusak berat dan tidak dapat direkondisi untuk selanjutnya mengusulkan penghapusan BMD;</p> <p>d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang untuk mengusulkan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya dalam Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 340/XI/Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu Timur.</p>	<p>Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:</p> <p>a. Melakukan inventarisasi atas seluruh aset tanah pada KIB A, membuat jadwal/perencanaan pengurusan sertipikat tanah, dan menganggarkan biaya pensertipikatan tanah serta biaya pembuatan papan nama tanah sesuai kemampuan keuangan daerah;</p> <p>b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang agar:</p> <p>1) Menelusuri aset sekolah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang belum tercatat pada KIB A, KIB B dan KIB C, serta mengukur, menilai, dan mencatat pada masing-masing KIB;</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan serah terima aset SMA kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; dan</p> <p>3) Melakukan inventarisasi atas bidang tanah yang dipergunakan oleh pihak ketiga dan membuat perikatan/perjanjian hibah atau pinjam pakai;</p> <p>c. Menginstruksikan seluruh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang untuk menginventarisasi dan memverifikasi data Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, yang rusak berat dan tidak dapat direkondisi untuk selanjutnya mengusulkan penghapusan BMD;</p> <p>d. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Barang untuk mengusulkan penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya dalam Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 340/XI/Tahun 2015 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu Timur.</p>	P4 Mei 2022	





BUPATI LUWU TIMUR

JL. Soekarno- Hatta Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

M A L I L I, 92981

**RENCANA AKSI
SEBAGAI BENTUK RENCANA TINDAK LANJUT ATAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TA. 2021**

I. Latar Belakang

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Maret s.d 25 April 2022 dan penyerahan LHP dilakukan pada tanggal 17 Mei 2022.

Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat 1 dan 2, bahwa:

Ayat (1) "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan".

Ayat (2) "Pejabat wajib memberikan jawaban, atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan".

maka perlu disusun rencana aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjut atas LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

II. Maksud dan Tujuan

Rencana aksi ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK-RI atas temuan-temuan audit sebagaimana tercantum dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

III. Rencana Aksi

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran surat ini.

IV. Penutup

Dengan disusunnya rencana aksi ini maka penyelesaian rekomendasi yang dituangkan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dapat segera ditindak lanjuti.

Malili, 17 Mei 2022



BUPATI LUWU TIMUR

BUDIMAN, M.Pd